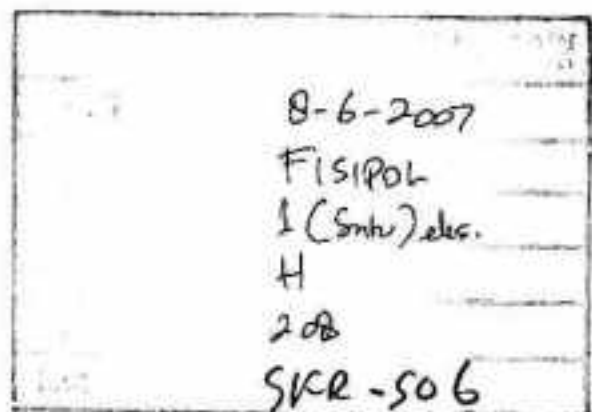


**PELUANG KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN DALAM  
MENGHADAPI MASALAH TERORISME**



IBR

P

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Kesarjanaan  
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*

*Oleh*

**KASMAWATI IBRAHIM**  
**E 131 02 732-2**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PELUANG KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN DALAM MENGHADAPI MASALAH TERORISME

**NAMA** : KASMAWATI IBRAHIM  
**NIM** : E 131 02 732-2  
**JURUSAN** : POLITIK PEMERINTAHAN  
**PROGRAM STUDI** : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Disetujui Oleh:

Konsultan I,

Konsultan II,



Drs. H. A. Yakub, M.Si  
NIP : 131 907 682



Drs. Aspianoor Masrie  
NIP: 131 992 457

Mengesahkan :

Ketua Jurusan

Ilmu Politik Pemerintahan

dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Armin Arsyad, M. Si

NIP : 131 961 985

**HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI**

**PELUANG KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN DALAM  
MENGHADAPI MASALAH TERORISME**

**NAMA** : KASMAWATI IBRAHIM  
**N I M** : E 131 02 732-2  
**JURUSAN** : POLITIK PEMERINTAHAN  
**PROGRAM STUDI** : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 16 Mei 2007.

**Tim Evaluasi**

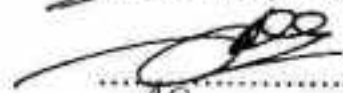
**Ketua** : Drs. Patrice Lumumba, MA.



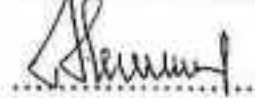
**Sekretaris** : Ishaq Rahman, S.IP.



**Anggota** : 1. Drs. H.A. Ya'kub, M.Si.



2. Drs. Aspiannor Masrie



3. Drs. Munjin Syafik Ash'ary

.....

## ABSTRAK

**Kasmawati Ibrahim (E 131 02 732 -2). *Peluang Komunitas Keamanan ASEAN dalam Menghadapi Masalah Terorisme***, dibawah bimbingan Andi Yakub sebagai Pembimbing I dan Aspiannor Masri sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan secara jelas peran dan langkah-langkah apa yang diambil Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme, serta peluang kerjasama keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* yang menggambarkan dan menjelaskan dengan menganalisis secara konkrit mengenai peluang Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme, dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka (*library research*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan *teknik kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain: *ASEAN Security Community (ASC)* atau Komunitas Keamanan ASEAN dalam peranannya untuk pemberantasan terorisme di Asia Tenggara masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti prinsip non-intervensi, serta masih adanya keengganan sejumlah Negara dalam menyepakati aksi bersama (*Plan Action*) dari ASC ini. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh ASC sejak pengusulannya pada tahun 2003 silam adalah semakin terjalannya komunikasi dan koordinasi antara negara ASEAN dalam hal pemberantasan terorisme dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Keberadaan ASC ke depan menunjukkan prospek yang menjanjikan dan diharapkan dapat membantu mempercepat integrasi ASEAN.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, pulalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan Taslim teruntuk kepada junjungan besar Rasulullah SAW, Rahmatan Lil Alamien.

Penulis sadar dengan segala kemampuan yang terbatas dan segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan masukan atau saran serta koreksi yang bersifat konstruktif dari segenap pembaca yang nantinya dapat melengkapi skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang teristimewa dengan segenap cinta dan hormat ananda haturkan kepada ayahanda Almarhum Ibrahim dan Ibunda Saoda (Ny. Mamara) yang telah mendidik, mendorong dan mendoakan keberhasilan penulis. Serta kepada Saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan dorongan serta motivasi selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan terutama kepada Bapak Drs.H.A.Ya'kub, M.Si., dan Drs. Aspiannor Masrie selaku Konsultan I dan Konsultan II, yang dengan kesediaan, keikhlasan dan kesungguhan membimbing penulis sejak awal penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Selain itu bantuan dari berbagai pihak yang memberikan motivasi baik berupa moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO, Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Deddy T. Tikson, Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. M. Kausar Bailusy, MA., Dra. Hj. Nurlinah M, M.Si., dan Drs. Abd. Gaffar, M.Si., Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas,
5. Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas,
6. Bapak Drs. Nurdin Nara, M.Si., Ketua Program Reguler Sore Fisip Unhas, dan Bapak Drs. Mursalim, M.Si., Sekretaris Program Reguler Sore Fisip Unhas.
7. Bapak Drs. A. Syamsuddin, MS, dan Drs. H. Darwis, MA., yang telah memberikan kesempatan dan bantuan selama perkuliahan sampai selesai.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar program studi Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmunya selama perkuliahan.
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Unhas dan Reguler sore, terima kasih atas bantuannya selama ini.

10. Terkhusus Kakanda Drs. Abdul Rasyid, St. Ramlah, S.Pd, Jamaluddin, dan Adik Rosmawati, S.Pd., atas segala perhatian dan doa yang tulus demi keberhasilan penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unhas yang telah memberikan bantuan yang baik selama mengikuti perkuliahan.
12. Keponakan tersayang (Nadya Elsa, St. Nurhaliza, dan Adrianas) teman bermain penulis di rumah.

Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu atas jasa dan bantuannya selama perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis berdoa, semoga segala bantuan, pengorbanan, serta perhatiannya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Makassar, Mei 2007

**Kasmawati Ibrahim**  
**E 131 02 732-2**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metoda Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Kepentingan Nasional .....	14
B. Stabilitas dan Keamanan Regional .....	19
C. Terorisme .....	25
BAB III GAMBARAN UMUM ASEAN .....	33
A. ASEAN .....	33
B. Kerjasama Komunitas Keamanan ASEAN.....	37
C. Aksi Terorisme di Asia Tenggara.....	42



BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	57
A. Peran Komunitas Keamanan ASEAN Dalam Menghadapi Masalah Terorisme di Asia Tenggara .....	57
B. Langkah-langkah Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan Komunitas Keamanan ASEAN .....	68
C. Peluang Kerjasama Keamanan ASEAN Dalam Menghadapi Masalah Terorisme.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

## DAFTAR TABEL

1.	Jumlah Serangan Teroris Internasional Terhadap Berbagai Jenis Fasilitas Internasional (2002-2006).....	31
2.	Jumlah Serangan Teroris Internasional per Kawasan (2002-2006) .....	32

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini dunia dihadapkan pada suatu transisi sistem internasional dari sistem bipolar ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi oleh berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang sangat cepat. Proses transisi dan globalisasi ini di satu sisi memberi keuntungan, namun di sisi lain juga dapat berdampak negatif bagi perkembangan pembangunan suatu bangsa dan negara. Kompleksitas hubungan internasional yang terjadi pada saat ini, bahkan tidak saja membatasi dampak negatif tersebut kepada satu atau dua negara saja, namun dapat juga berdampak negatif kepada suatu kawasan atau dunia pada umumnya.

Berakhirnya Perang Dingin ternyata belum bisa menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dunia yang lebih baik. Di mana kondisi keamanan dunia masih tetap saja diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, pengembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Kekhawatiran yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu keamanan non tradisional seperti terorisme, konflik antar etnis, pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan narkoba, imigran gelap, serta kriminal lintas negara lainnya.

Sejak peristiwa pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) dan *Pentagon* di Amerika Serikat, tanggal 11 September 2001 dan kasus-kasus

penyelundupan manusia, narkoba, dan obat-obatan terlarang serta pembajakan laut di perairan Asia Tenggara merupakan beberapa contoh kasus kejahatan lintas negara. Dan ini menunjukkan bahwa kejahatan ini dari waktu ke waktu meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Terorisme internasional telah menjadi ancaman bagi dunia, dan diperkirakan masih terus akan membayangi dunia sampai beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu terorisme harus diperangi bersama oleh semua negara di dunia, karena sangat mempengaruhi dinamika stabilitas keamanan dunia dan kawasan regional. Dewasa ini kecenderungan keamanan yang muncul di kawasan adalah munculnya konflik yang menyangkut masalah klaim territorial, jalur komunikasi dan perdagangan, serta isu-isu keamanan non tradisional lainnya. Isu-isu keamanan yang berkembang dalam lingkup global juga menjadi isu utama bagi kawasan regional dan bangsa-bangsa di dalamnya.<sup>1</sup>

Permasalahan keamanan yang dialami Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara ini juga dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya. Posisi yang sangat strategis karena merupakan suatu bangsa yang berada di tengah-tengah perkembangan dunia, dan tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Posisi seperti inilah yang menyebabkan terjalinnya kepentingan nasional Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara guna menghadapi permasalahan-permasalahan keamanan dan penyelesaian sengkata antar negara

---

<sup>1</sup> *Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Strategis Pertahanan*, terdapat dalam [http://www.dephan.go.id/buku\\_putih/bab\\_v.htm](http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm), 14 Jul 2005 18:20:36 GMT. Didownload tanggal 31 Maret 2006.

ASEAN itu sendiri. Untuk itulah Indonesia mengajukan suatu gagasan agar dibentuknya suatu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) pada pertemuan Tingkat Tinggi Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*) yang ke 36 di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 16 – 19 Juni tahun 2003.<sup>2</sup>

Komunitas Keamanan ASEAN yang diusulkan Indonesia diharapkan mampu berperan dalam mengatasi isu-isu keamanan dan ancaman baik itu tradisional maupun non tradisional khususnya terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Tenggara, serta dapat meningkatkan stabilitas keamanan intra negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Menyimak namanya Komunitas Keamanan ASEAN menyiratkan adanya suatu forum kerjasama militer. Namun, secara teoritis Komunitas Keamanan adalah sekumpulan negara yang anggotanya memiliki harapan timbal balik akan perubahan yang damai serta menolak penggunaan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi di Asia Tenggara.

Melalui Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN akan merumuskan dengan kongkret kondisi ASEAN sebagaimana yang ingin dicapai dari kerjasamanya dibidang politik dan keamanan dan menyepakati langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut baik modalitas maupun program kerjanya. Dengan kata lain, dengan Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN akan membawa

---

<sup>2</sup> Menlu: *Komunitas Keamanan ASEAN Tak Jadi Fakta Militer*, terdapat dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4416>, tanggal 7 Pebruari 2005 waktu 18:25:55 GMT, di download tanggal 25 Maret 2006.

kerjasama politik dan keamanannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk dalam menghadapi masalah terorisme di Asia Tenggara.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Terjadinya transformasi terhadap konsep keamanan dari isu keamanan tradisional ke arah isu keamanan non tradisional merupakan suatu bentuk ancaman baru yang harus dihadapi semua kawasan dan negara di dunia. Isu keamanan tradisional dan non tradisional yang terjadi di kawasan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yaitu terorisme internasional, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional dan dalam negeri. Sehingga Indonesia sebagai anggota ASEAN mengusulkan gagasan agar dibentuknya suatu Komunitas Keamanan ASEAN di Asia Tenggara pada pertemuan Tingkat Tinggi Menteri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting) yang ke 36 di Phnom Penh Kamboja.

Sudah waktunya bagi negara-negara anggota ASEAN mulai memikirkan dan mempertimbangkan untuk memiliki konvensi regional di kawasan Asia Tenggara mengenai terorisme. Hal ini penting selain sebagai cerminan komitmen global ASEAN terhadap *United Nations Declaration on Measures to Eliminate International Terorisme* (1994), yang memandatkan negara anggota PBB untuk memiliki instrumen regional guna memerangi terorisme, juga sebagai pegangan bagi negara-negara ASEAN untuk menggalang kerjasama yang lebih intensif dan konstruktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme internasional di kawasan Asia Tenggara.

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penulis merumuskannya dalam suatu bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kerjasama Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme?
2. Langkah-langkah apa yang diambil Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme?
3. Bagaimana peluang kerjasama Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan peran Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.
2. Mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah apa yang diambil Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.
3. Mengetahui peluang kerjasama keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.

#### **b. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa yang akan datang,

serta memberikan tambahan informasi bagi peminat masalah hubungan internasional maupun para akademisi khususnya terkait dengan masalah peluang Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.

2. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyikapi fenomena terorisme internasional untuk bisa mewaspadaikan adanya bahaya besar pada bangsa ini terkait munculnya terorisme internasional di Indonesia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam pengkajian Ilmu Hubungan Internasional, interaksi yang berlangsung antara negara selalu tidak lepas dari konsep kepentingan nasional, dimana setiap negara memiliki kompetensi terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, yang dalam upayanya tersebut suatu negara akan selalu membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara lain.

Konsep kepentingan nasional sebagai suatu konsep yang sering muncul dalam pengkajian-pengkajian Ilmu Hubungan Internasional merupakan satu konsep yang dianggap relevan untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan setiap negara dalam interaksinya di dunia internasional selalu membawa kepentingan nasionalnya masing-masing. Suatu pandangan mengenai konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Rudy mengatakan bahwa: kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa dan negara atau sehubungan dengan yang dicita-citanya. Dalam hal ini kepentingan nasional



yang relatif tetap dan sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.<sup>3</sup>

Suatu negara akan mendesain kepentingannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif. Oleh karena itu negara tersebut akan menentukan kepentingannya berdasarkan apa yang hendak direalisasikannya. Negara tersebut kemudian mendesainnya dalam bentuk target-target yang mungkin dilaksanakan. Target-target tersebut kemudian dibawa ke dalam pentas internasional, yang kemudian dikenal dengan istilah politik luar negeri (*foreign policy*). Kepentingan yang diadopsi oleh negara kadang-kadang merupakan kepentingan umat secara keseluruhan, dan kadang-kadang merupakan kepentingan kelompok terkuat yang ada di dalamnya.<sup>4</sup>

Politik luar negeri adalah suatu aspek kehidupan bangsa dan negara, dalam arti bahwa melalui pelaksanaan politik luar negeri negara itu terselenggara interaksi antar bangsa dan negara dengan komunitas internasional. Melalui politik luar negerinya, maka sesuatu bangsa dan negara memasuki pergaulan antara bangsa baik secara bilateral maupun multilateral dalam lingkup regional dan global.

Batasan mengenai politik luar negeri dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Prawirasaputra sebagai berikut:

<sup>3</sup> T. May Rudy, *Studi Strategis, Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 116.

<sup>4</sup> Muhammad Musa, *Hegemoni Barat Terhadap Percaturan Politik Dunia, Sebuah Potret Hubungan Internasional*, Wahyu Press, 2003, hal. 8.

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijaksanaan sesuatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi.<sup>5</sup>

Pendapat lain tentang pengertian politik luar negeri yang dikemukakan oleh Plano dan Olton sebagai berikut:

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan untuk dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>6</sup>

Peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, dan serangkaian bom lainnya termasuk peledakan Bom Bali II tahun 2005 yang merupakan serangkaian serangan teroris di Indonesia. Serangan-serangan tersebut kian memperkuat penilaian negara-negara lain dalam mengklaim Indonesia sebagai sarang terorisme. Adapun pengertian terorisme yang didefinisikan oleh Habib sebagai berikut:

Terrorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah nonkombatan untuk mencapai tujuan politik.<sup>7</sup>

Sementara terorisme internasional didefinisikan oleh Sukawarsini Djelantik sebagai serangan langsung oleh suatu fraksi atau golongan terhadap warga negara dan milik negara lain.<sup>8</sup> Menurut Hasnan Habib terorisme internasional adalah bentuk

<sup>5</sup> S. Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri RI*, CV. Remaja Karya Bandung, 1985, hal. 7.

<sup>6</sup> Jack C. Plano, Olton. *Kamus Hubungan Internasional Terj.* Wawan Juanda, CV. Abardin Bandung, 1995, hal. 5.

<sup>7</sup> Hasnan Habib, *Kapita Selekta Strategi dan Hubungan Internasional*, CSIS Jakarta, 1995, hal. 59.

<sup>8</sup> Sukawarsini Djelantik, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Parahyangan Centre Study of International Studies, Bandung, 1999, hal. 178.

kekerasan politik yang melibatkan warga atau wilayah lebih dari satu negara. Ia juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan di luar ketentuan diplomasi internasional dan perang.<sup>9</sup> Peluang munculnya kelompok terorisme sebagai aktor hubungan internasional dimungkinkan dengan adanya pandangan kaum pluralis dalam melihat aktor-aktor hubungan internasional.

Kebanyakan negara di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Indonesia, melihat bahwa tragedi 11 September 2001 lebih merupakan persoalan Amerika Serikat ketimbang sebuah persoalan global. Meskipun seluruh dunia, termasuk negara-negara Asia Tenggara menyatakan rasa simpati terhadap tragedi yang menimpa AS, pada umumnya tidak terlalu yakin bahwa tragedi serupa dapat juga terjadi di kawasan. Hal itu antara lain terlihat dari sikap skeptis yang ditunjukkan sebagian kalangan terhadap niat dan seruan AS dalam memerangi terorisme pada tataran global, termasuk di Asia Tenggara.

Untuk menanggulangi masalah terorisme internasional maka terbentuknya formulasi kerjasama multilateral dalam menanggulangi kejahatan lintas negara tersebut diharapkan akan bisa menciptakan deterrence terhadap kemungkinan ancaman teror yang ada. Beberapa alternatif taktik kerjasama penanggulangan kejahatan terorisme internasional yang diharapkan bisa efektif diantaranya lewat pertukaran informasi intelejen mengenai kegiatan terorisme internasional. Selain itu aliansi ASEAN yang bersifat strategis dan pengetatan pengawasan perbatasan antara

---

<sup>9</sup> Op Cit hal. 59

negara ASEAN juga akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kegiatan terorisme internasional.

Pada tanggal 8 Agustus 1967 lima *founding father ASEAN (Association of Southeast Asia Nations)*, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Thanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narsisco Ramos dari Piliphina, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia berkumpul di Bangkok menorehkan sejarah di regional Asia Tenggara membangun satu perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Salah satu tujuan deklarasi tersebut ditegaskan:

“Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administraso”.<sup>10</sup>

Pada bulan Agustus 2002 dalam usianya yang ke tiga puluh lima, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara masih belum dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan Deklarasi Bangkok, apalagi jika membandingkan kemajuan dan lompatan yang telah dicapai dengan masyarakat Eropa yang telah terintegrasi menjadi suatu kekuatan politik dan ekonomi dunia. Sesungguhnya apabila dilihat dari sejarah berdirinya Uni Eropa, didirikan hanya sepuluh tahun sebelum terbentuknya ASEAN yang berdasarkan *Rome Teaty* 1957. Negara-negara Asia Tenggara dalam mencapai visinya perlu belajar banyak dari organisasi “*Suprasional Uni Eropa*”.

---

<sup>10</sup> Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 142.



Maksud dan tujuan ASEAN dapat ditelusuri dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang meliputi:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan kawasan ini.
2. Meningkatkan kerjasama dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dibidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam berbagai bidang.
5. Meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka.
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional.

Dalam ulang tahunnya yang ke 35, ASEAN menegaskan kembali visinya dalam suatu kalimat yang tersusun baik, nyaman di telinga, tenteram dalam perasaan,

tetapi sekaligus merupakan utopia yang selalu menjadi patamorgana yang hanya ada dalam dunia imajiner. Visi tersebut adalah “terwujudnya ASEAN sebagai wadah kerjasama bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan dinamis dan komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.”<sup>11</sup>

## **E. Metoda Penelitian**

### **a. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan dengan menganalisis secara konkrit mengenai peran Komunitas Keamanan ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.

### **b. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik telaah pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, majalah, surat kabar, karya tulis ilmiah dan website yang mampu memberi data yang relevan bagi tulisan ini. Untuk langkah selanjutnya agar data bisa lebih valid dan lebih rinci maka ada sejumlah tempat yang dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian ini yakni:

1. Departemen Luar Negeri (Deplu), di Jakarta.
2. *Center of Strategic International Study (CSIS)*, di Jakarta.

---

<sup>11</sup> Ibid. hal. 143.

3. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Perpustakaan Wilayah di Makassar.

**c. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, dan tidak dapat dikuantitatifkan. Dengan tujuan menggambarkan variabel-variabel yang dapat dibandingkan atas dasar hasil studi pustaka yang sebagian besar bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif dengan menjelaskan data yang bersifat umum yang akan menuju pada satu kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepentingan Nasional

Negara adalah unit politik dimana didalamnya terdapat berbagai kelompok atau elemen dengan berbagai kepentingan, didalamnya berbagai macam model interaksi berlangsung. Kepentingan-kepentingan dari berbagai kelompok ini pada akhirnya akan bermuara atau terakomodasi dalam bentuk kepentingan nasional.

Frankel memahami hakikat konsep kepentingan nasional sebagai keseluruhan dari nilai yang hendak ditegaskan oleh suatu bangsa. Kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara, nilai itu merupakan tujuan umum dan langsung, yang apabila dirumuskan akan mencerminkan konsensus nasional tentang falsafah hidup (*weltanschauung*) dari suatu bangsa. Walaupun tidak jarang bahwa kepentingan nasional yang ingin diperjuangkan merupakan kepentingan dari kelompok-kelompok yang dominan, atau bahkan individu-individu dengan ambisi tertentu. Persoalannya ialah bagaimana membedakan kepentingan nasional dari kepentingan kelompok, kelas, elit yang berkuasa atau kelompok asing-asing yang kepentingannya diperjuangkan dari dalam negeri.

Dalam bahasan Mohtar Masoed, Morgenthau menyebutkan bahwa arti yang melekat pada kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*); kemampuan minimum negara-bangsa dalam melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya. Dari tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan



kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik.

Kepentingan nasional merupakan konsep umum yang dapat dirumuskan secara luas sehingga perlu memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral, agama, kesejahteraan dan hal-hal yang bersifat altruistik lainnya. Kadangkala pada prakteknya interpretasi atau penafsiran tentang kepentingan nasional ini tergantung pada kondisi dan ideologi yang dominan. Dengan penafsiran tertentu seorang negarawan bisa saja menjustifikasi tindakannya terhadap negara lain atas nama kepentingan nasional. Morgenthau menyebutkan bahwa kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan; hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung terus menerus. Pemerintahlah dengan segala institusinya yang akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.

Morgenthau memahami bahwa kepentingan nasional sebagai suatu konsep harus diartikan sebagai power. Hal ini tergambar jelas dalam pandangan Morgenthau: "kepentingan nasional sebagai konsep kelangsungan hidup (*national survival*) sekaligus merupakan esensi dari politik." Menurutnya kepentingan nasional adalah identik dengan usaha negara untuk mengejar power dimana power dipandang sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memelihara ataupun mengembangkan kontrol suatu negara terhadap negara lain. Oleh karena itu menurut Morgenthau strategi

diplomasi harus dimotivasi oleh kepentingan nasional bukan oleh kriteria moralistik-legalistik.

Usaha pencapaian kepentingan nasional suatu negara tidak hanya dengan berdiam diri tetapi melalui pergaulan atau interaksi dengan negara lain baik secara bilateral, multilateral dalam lingkup global maupun regional. Hal ini dikarenakan setiap negara tidak mungkin memenuhi kepentingan nasionalnya atas kebutuhan-kebutuhan tertentu tanpa melakukan interaksi dengan negara lain. Dalam interaksinya tersebut suatu negara akan berusaha sejauh mungkin menghindari kondisi-kondisi yang merugikan dirinya, sebaliknya berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan nasionalnya.

Dalam hubungannya dengan interaksi internasional, kepentingan nasional merupakan inti dari politik luar negeri. Gareth Evans dan Bruce Grant menjelaskan kedudukan kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan politik luar negeri sebagai berikut :

*"The starting point in making decisions about foreign policy is the necessarily the concept of national interest. It is turns that all foreign policy is, or should be, directed at the protection and advance of the national interest."*

Dengan kata lain kepentingan nasional merupakan titik awal/ landasan bagi pembuatan keputusan tentang kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri (seharusnya) diarahkan pada perlindungan dan kemajuan kepentingan nasional. Seperti yang dinyatakan oleh Frankel: "politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan keluar negeri dan tidak terpisah dari tujuan

nasional dan tetap merupakan komponen atau unsur dari dalam negeri". Demikian pula yang diungkapkan oleh Dahlan Nasution : sebagai instrumen analitik, kepentingan nasional dipergunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengevaluasi sumber-sumber atau kelayakan kebijaksanaan luar negeri suatu negara; sebagai instrumen dari tindakan politik, konsep tersebut berfungsi sebagai alat untuk membenarkan, mengabaikan atau mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Tujuan atau kepentingan nasional adalah sasaran kebijakan politik luar negeri. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kepentingan nasional adalah konsep yang sangat umum dan luas, sehingga agar relevan dengan kebijaksanaan luar negeri, pandangan tersebut harus dijabarkan sebagai sasaran yang pragmatis. Selain itu arah dan saran kebijakan politik luar negeri dapat saja berubah tergantung kondisi atau perubahan yang terjadi pada dunia internasional. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Nuechterlein yang menggambarkan kepentingan nasional sebagai produk dari suatu proses politik melalui pemimpin dari suatu negara yang tiba pada suatu keputusan tentang pentingnya suatu peristiwa luar terhadap keadaan negerinya. Dengan ini Nuechterlein menggambarkan bahwa setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar negeri atau menimpa negara lain demikian pula sikap-sikap serta pola tindakan dari suatu negara apapun ,kecil atau besar, langsung atau tidak, disadari maupun tidak, turut mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.

Jika kepentingan antara mereka berlangsung harmonis, maka negara-negara tersebut akan bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi melalui kerjasama atau jalan damai. Tapi jika terjadi perbedaan kepentingan-kepentingan, maka lahirlah persaingan, permusuhan, ketegangan, yang pada akhirnya dapat menyulut peperangan. Untuk itu bangsa atau negara tersebut memerlukan kebijaksanaan dan strategi yang dianggapnya tepat agar kepentingan nasionalnya minimal tidak dirugikan, maksimal memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam interaksinya dengan dunia luar yang menjadi lingkungannya.

Untuk memenuhi kepentingan nasional, melalui kebijakan luar negeri dalam praktiknya dibutuhkan strategi yang tepat dan jitu, khususnya dalam menghadapi persaingan antar negara yang sangat kompetitif. Dalam menyusun serta menentukan kebijakan tersebut ada sejumlah kecermatan yang perlu diperhitungkan yaitu (1) kecermatan dalam memperhitungkan kekuatan yang dimiliki, (2) kecermatan dalam melihat kelemahan-kelemahan yang relatif dimiliki, (3) kecermatan dalam memperkirakan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang empirik yang dapat dimanfaatkan dan (4) kecermatan dalam mengantisipasi kendala atau ancaman situasional yang mungkin dihadapi.

Faktor kecermatan dalam memperjuangkan kepentingan nasional penting terutama apabila dikaitkan pada tiga kepentingan fundamental dalam kebijaksanaan luar negeri. *Pertama* ialah mempertahankan kehidupan bangsa dan negara dan integritas teritorialnya. *Kedua*, untuk memajukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan peluang dan kesempatan

yang ada. *Ketiga*, meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan masalah-masalah internal domestik.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kepentingan nasional merupakan faktor determinan atau merupakan konstanta dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Arah dan kebijaksanaan luar negeri bisa saja berubah tergantung persepsi atau penafsiran terhadap fenomena internasional tetapi kepentingan nasional merupakan faktor yang paling konstan dan tetap menjadi pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

#### **B. Stabilitas dan Keamanan Regional**

Kerjasama regional merupakan bentuk nyata dalam hubungan antar negara-negara dalam pergaulan internasional. Tidak jarang terjadi, masalah-masalah internal suatu negara dapat teratasi berkat kerjasama regional. Pertimbangan *political security* atau pertimbangan ekonomi dan pembangunan, kadang-kadang merupakan awal dari suatu inisiatif kerjasama regional yang diprakarsai oleh negara tertentu. Menurut Gordon, partisipasi suatu negara dalam kerjasama regional akan merupakan langkah raksasa ke arah stabilitas.<sup>12</sup>

Meningkatnya ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lain memunculkan fenomena regionalisme atau faham-faham kawasan, dimana negara-negara saling bekerjasama.

---

<sup>12</sup> Bernard K. Gordon, 1996; 25

Ilmu hubungan internasional yang mengkaji interaksi antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional dalam berbagai aspek dan permasalahannya mengenai beberapa pendekatan dalam mengkaji dan menganalisa fenomena-fenomena di forum internasional. Ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan pluralis, realis, dan globalis. Ketiga pendekatan ini berbeda dalam menginterpretasikan percaturan politik internasional. Pesan itu dapat kita lihat pula pada tema sentral, aktor utama, proses interaksi maupun juga jalur komunikasi yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan dua perspektif yang memiliki relevansi dalam kajian keamanan regional. Kedua perspektif tersebut adalah perspektif realis dan perspektif pluralis. Realitas yang terdapat dalam interaksi antar bangsa yang ada di dunia merupakan gabungan dari kedua perspektif tersebut termaktub pada asumsi ketiga yaitu *behavioral dynamic* (dinamika perilaku).

### **Pendekatan realis tentang konsep keamanan regional**

Perspektif realis mempunyai tema *the politics of power and security*<sup>13</sup> atau pendekatan pada masalah kekuasaan dan keamanan. Hubungan internasional ditandai dengan anarkhi internasional dimana dalam berinteraksi negara-negara didunia lebih menekankan pada keamanan nasional (*national security*) dalam membuat kebijaksanaan luar negerinya. Perspektif realis ini menekankan pada *real politic*. Fokus pendekatan pada realisme ini adalah bagaimana setiap negara mengamankan

<sup>13</sup> Nasrun, Mappa, *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problm and Prospect*, Desertasi, Unahs: 1990, hal. 22.

kepentingan nasionalnya, artinya dalam berinteraksi, suatu negara dihalalkan mengambil keuntungan dari kelemahan negara lain.

Perspektif realis memiliki tiga ciri pokok, yang pertama adalah negara (*state*) sebagai pelaku utama dalam politik internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara (*inter-governmental*), dimana keamanan suatu negara dilihat dalam konteks kepentingan nasional sehingga dalam berinteraksi dengan suatu negara maka negara merupakan aktor yang paling dominan. Negara sebagai pelaku utama memiliki suara yang mewakili seluruh bangsa.

Perspektif realis jika dikaitkan dengan konteks keamanan regional maka ciri pertama tadi menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menentukan kebijaksanaan yang mewakili seluruh bangsa dalam memperjuangkan keamanan negara (*national security*). Keamanan nasional ini menurut pandangan kaum realis memiliki keterkaitan yang erat dengan keamanan kawasan (*regional*). Morgenthau berpendapat bahwa keamanan regional harus didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan nasional. Kepentingan nasional menurut kaum realis hanya dapat terwujud dengan terciptanya keamanan nasional. Hal ini berpijak pada prinsip pendekatan realis yang bertema keamanan dan kekuasaan.

Morgenthau lebih jauh mengemukakan tentang kaitan antara kepentingan nasional dan kepentingan regional bahwa kepentingan nasional harus lebih diutamakan daripada kepentingan regional.<sup>14</sup> Secara implisit dapat kita lihat bahwa

---

<sup>14</sup> Hans J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Buku Kesatu, Revisi Kenneth W. Thompson, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991, hal. 144.

dalam pandangan kaum realis secara nasional harus lebih diutamakan daripada kepentingan atau keamanan regional. Ciri kedua dari pendekatan *the politic and power security* dalam menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Menurut paham ini menggunakan ancaman merupakan instrumen yang paling efektif dalam pencapaian politik luar negeri suatu negara.<sup>15</sup> Pendapat ini memberi pengertian bahwa kekuatan militer yang besar dan maju serta didukung kekuatan ekonomi yang besar sebagai penopang kekuatan militer akan selalu lebih unggul dibandingkan negara dengan kekuatan militer dan ekonominya lemah. Dalam konteks keamanan regional ciri kedua dari perspektif tadi memberikan gambaran bahwa kemampuan militer yang kuat dan didasari ekonomi yang kuat akan membawa konsekuensi rasa aman.

Ciri lainnya dari perspektif *the politics of power and security* adalah hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Masalah keamanan atau militer ditempatkan sebagai isu utama sehingga dinamakan *high politik* (politik tinggi), sedangkan kepentingan-kepentingan selain dari kepentingan keamanan diletakkan pada *low politics* (politik rendah) yang tunduk pada kepentingan utama. *Low politics* itu sendiri berupa bidang ekonomi, sosial budaya, yang mana bidang ini diharapkan atau ditujukan untuk menopang unsur utama *high politics*, yaitu keamanan.

Morgenthau secara spesifik mengemukakan pandangannya tentang konsep keamanan regional dalam dua poin<sup>16</sup>, yaitu:

---

<sup>15</sup> Mappa Nasrun, 1990, hal. 6

<sup>16</sup> Hans J Morgenthau, *Opcit*



- a. Masalah keamanan bukan merupakan masalah per negara melainkan merupakan tanggung jawab bersama semua negara yang berada dalam suatu lingkup regional atau internasional. Keamanan ini harus secara kontinyu dipelihara dan dikembangkan baik dengan melalui persenjataan maupun melalui unsur-unsur lain yang menyangkut kekuatan nasional.
- b. Keamanan menjadi masalah dan tanggung jawab semua negara yang berada dalam kawasan yang harus secara bersama-sama memelihara keamanan tersebut. Pemeliharaan keamanan didasarkan atas keyakinan bahwa seakan-akan keamanan mereka sendiri yang dipertaruhkan.

#### **Pendekatan pluralis tentang konsep keamanan regional**

Pendekatan pluralis bertemakan *the politics of complex interdependence and transnational relations*. Perspektif ini berbeda dalam mengkaji fenomena internasional. Tema sentral dari paham ini tidak terpaku pada pendekatan masalah kekuasaan dan keamanan tetapi lebih menitikberatkan pada hubungan di bidang lain. Perspektif pluralis berpendapat bahwa tidak hanya negara yang bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung tetapi juga aktor non-negara bisa berperan banyak. Dalam konteks keamanan regional dapat dilihat bahwa interaksi negara-negara dalam region tidak semata-mata dipengaruhi oleh usaha perebutan kekuasaan tapi juga terdapat hal-hal lain yang melingkupi interaksi tersebut seperti masalah ekonomi.

Keohane dan Nye mengemukakan tiga ciri pokok yang membedakan pendekatan pluralis dengan analisa realisme politik. Ciri pertama ialah yang

menyangkut jalur komunikasi yang dipakai dalam arena internasional. Menurut pandangan *complex interdependence*, masyarakat dunia dihubungkan melalui komunikasi, yaitu jalur *interstate* (antar negara) dan jalur *transgovernment* (antar sub unit pemerintah) dan *transnational* (antar masyarakat), ciri kedua berdasarkan fungsi kekuatan militer dalam politik internasional. Ciri ini melihat bahwa suatu negara tidak akan menggunakan kekuasaan militer terhadap negara-negara sekawasan lainnya ataupun untuk mengatasi masalah yang diambil dari saling ketergantungan atau kerjasama. Namun kekuatan militer akan menjadi penting fungsinya dalam proses interaksi antara negara-negara yang bersekutu dalam blok lain yang merupakan saingan politik mereka. Ciri ketiga bahwa di dalam dunia yang didominasi oleh *complex interdependence* tidak ada hirarki dalam kepentingan politik yang diproses melalui interaksi internasional.<sup>17</sup>

*Complex interdependence* seperti yang dikemukakan oleh Kochane dan Nye mengemukakan tentang berkurangnya fungsi kekuatan militer dalam interaksi internasional. Jika dibandingkan dengan pendapat kaum realis yang mengatakan bahwa negara yang kuat secara militer akan mendominasi negara yang lemah, namun dengan adanya *complex interdependence* terdapat aturan keberhasilan bagi politik luar negeri suatu negara.

Kaum pluralis melihat konsep keamanan regional sebagai berikut:

- a. Aktor-aktor non negara seperti kelompok etnik, separatis dalam bangsa, kelompok ekonomi, organisasi non pemerintah turut berperan dalam interaksi

---

<sup>17</sup> Mappa Nasrun, 1990:15

antar negara yang akan berpengaruh banyak dalam masalah-masalah internasional termasuk interaksi antar negara dalam suatu kawasan.

- b. Politik internasional ditandai dengan adanya kerjasama antar negara pada sektor ekonomi, sosial dan budaya yang berfokus pada non militer. Namun hal ini berperan juga dalam proses pencapaian kedamaian nasional dan regional.
- c. Keamanan regional akan mempengaruhi keamanan nasional dan demikian juga sebaliknya. Keamanan nasional dan keamanan regional mempunyai hubungan sebab-akibat.
- d. Keamanan militer bukan merupakan isu yang mendominasi kegiatan politik internasional, karena kekuatan militer bukan merupakan jaminan bagi terciptanya keamanan.

### C. Terorisme

Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "teror" atau "terorisme". Kata "assassin" mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini. Kata "teror" masuk ke dalam kosakata politis baru pada Revolusi Prancis. Di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang PD II, "terorisme" menjadi teknik perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rejim Stalin pada 1930-an yang juga disebut "pemerintahan teror". Di era Perang Dingin "teror" dikaitkan dengan ancaman senjata nuklir.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Encarta Microsoft Reference Library 2004, 2004



Istilah "terorisme" sendiri pada 1970-an dikenakan pada beragam fenomena: dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintah bahkan menstigma musuh-musuhnya sebagai "teroris" dan aksi-aksi mereka disebut "terorisme". Istilah "terorisme" jelas berkonotasi peyoratif, seperti juga istilah "genosida" atau "tirani". Karena itu istilah ini juga rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Namun pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis.

Terorisme adalah fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal atau masyarakat yang menuju transisi ke sana. Kaum teroris memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat itu. Di dalam negara totaliter atau otoriter situasi relatif terkendali. Tetapi yang berlaku di sini adalah terorisme oleh negara. Sejauh rakyat patuh terhadap rezim, mereka relatif terjaga dari aksi teror yang berasal dari konflik horisontal.

Dalam insiden 11 September 2001 teror mencapai dimensi barunya, bukan "sekedar" ingin menunjukkan sikap perlawanan atau menekan terhadap sebuah rejim, melainkan juga ingin memobilisasi sebuah konflik global dengan mengisi "kevakuman ideologis" yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin. Skala gigantis dari teror ini 'sukses' memobilisasi opini politis global untuk mengarahkan kepada pembentukan antinomi "kawan" dan "lawan" pada skala global.

Terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*), seperti: kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian, dll. Namun terorisme tidak selalu politis, misalnya, penyanderaan oleh

seorang psikopat, sadistis ataupun orang iseng. Yang terakhir ini di luar pembahasan kita.

Terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>19</sup> (1) merupakan intimidasi yang memaksa; (2) memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; (3) korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6) para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan". Hard-core kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati. Terooris tampaknya adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis, dst. Tipe personalitas "prateroris" ini cocok dengan gerakan totaliter/sistem tertutup/sekte dan seterusnya.

Jika dicermati, "teror" itu sendiri sesungguhnya merupakan pengalaman subjektif, karena setiap orang memiliki "ambang ketakutannya" masing-masing.<sup>20</sup> Ada orang yang bertahan, meski lama dianiaya. Ada yang cepat panik hanya karena ketidaktahuan. Di dalam dimensi subjektif inilah terdapat peluang untuk "kesewenangan" stigmatisasi atas pelaku terorisme.

<sup>19</sup> Wilkinson, Paul, *Terrorism and the Liberal State*, The Macmillan Press Ltd., London, 1977, hal. 56-57.

<sup>20</sup> Gutteridge, William (ed), *Contemporary Terrorism*, Fact on File Publications, New York, 1986, hal. 10.

Tujuan-tujuan taktik teroris: (1) mempublikasi suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan; (2) aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok; (3) katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa; (4) menebar kebencian dan konflik interkomunal; (5) mengumumkan musuh atau kambing hitam; (6) menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Justifikasi aksi terorisme oleh para pelaku berdasarkan hal-hal berikut: (1) segala cara dibenarkan demi pencapaian tujuan transendental; (2) kekerasan ekstrem dianggap bersifat katarsis, memberi rahmat, regeneratif; (3) pelaku meletakkan aksinya dalam konteks sejarah, di mana aksi itu merupakan elemen dari hukum sejarah itu sendiri; (4) dijelaskan dari perspektif moral kesetimpalan 'mata ganti mata, gigi ganti gigi'; dan (5) aksi teror dipandang sebagai 'kejahatan kecil' dibandingkan dengan ancaman musuh yang merupakan 'kejahatan agung'.<sup>22</sup>

Jika pendefinisian terorisme memuat dimensi politis tertentu, bagaimana menawarkan sebuah definisi yang objektif? Salah satu kemungkinan adalah mendefinisikan terorisme bukan dari identitas pelaku atau alasan mereka, melainkan dari kualitas aksi mereka. Mengapa? Karena pendefinisian dari pelaku dapat bertolak dari stigmatisasi. Identifikasi alasan aksi teroris juga banyak tergantung pada persepsi

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Budi Hardiman, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, dalam Marpaung, Rusdi dan Al Araf (ed), *TERORISME Definisi, Aksi, dan Regulasi*, IMPARSIAL, Jakarta: 2003, hal. 10-16.

dan interpretasi. Namun kualitas aksi dapat diukur secara objektif. Dalam definisi ini kaitan antara korban dan target terorisme dapat dihapus, karena siapa korban tidaklah penting. Korban hanyalah sarana simbolis teknis untuk alasan-alasan aksi mereka. Semua aksi teroris memuat tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, kadang dengan tuntutan eksplisit. Kekerasan itu diarahkan kepada orang-orang yang tak melakukan perlawanan. Tujuannya politis dan dilaksanakan demi publisitas yang maksimal. Aksi dilakukan secara terorganisir dengan prinsip *arkanum* dalam perjuangan politis.

Pendekatan dengan melihat kualitas aksi atau peristiwa itu lebih menguntungkan karena: (1) dapat mengidentifikasi pola-pola yang luas dari aksi; (2) dapat mengenali kecenderungan di masa depan; (3) dapat mengetahui pertumbuhan terorisme itu; dan (4) dapat menemukan penyebarannya di dunia. Dua paradigma berlawanan: [1] Aksi yang disebut di atas dalam kerangka pandang demokrasi dan liberalisme disebut sebagai "terorisme" politis. [2] Aksi yang sama yang dilakukan oleh negara totaliter disebut "stabilisasi" politis. Sesuai prinsip demokrasi, aksi teror hanya dapat ditekan secara politis atau legal dengan tunduk pada kontrol publik. Sebaliknya, aksi teror negara totaliter dilakukan melalui politik *arkanum*.

### **Pola Terorisme Global**

Pencarian pola terorisme global dilakukan dengan men-deskripsikan (1) jumlah serangan terorisme internasional; (2) target serangan teroris; (3) kawasan-kawasan yang rawan terhadap serangan terorisme; dan (4) kelompok-kelompok teroris internasional. Deskripsi ini dibuat berdasarkan data dari *MIFT Terorisme*,

sebuah bank data yang mengkhususkan pada berbagai insident dan organisasi terorisme.<sup>23</sup>

Pola pertama yang ingin dicari adalah jumlah serangan terorisme internasional. Data yang ada menunjukkan bahwa sejak 2002 hingga 2006, dunia internasional digoncang oleh 18.806 serangan terorisme internasional. Data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari serangan terorisme dan merupakan jumlah serangan teroris tertinggi selama ini. Pada dekade 1980-an, kelompok teroris rata-rata melakukan 548 serangan per tahun. Angka ini turun cukup tajam di dekade 1990 menjadi 386 serangan per tahun dan mencapai titik terendah pada 1998 dengan jumlah serangan 274. Pada 1999 dan 2000 jumlah serangan teroris kembali meningkat tajam (392 dan 423 serangan) dan mencapai puncaknya pada tahun 2002 – 2006 dengan 18.806 serangan atau rata-rata 3761 serangan per tahunnya.

Pola serangan teroris internasional lain yang menarik untuk dikaji adalah target serangan. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir kelompok-kelompok teroris internasional cenderung memilih target lain-lain (media, wisatawan, NGO, bandara, fasilitas umum, transportasi dan lain-lain) sebagai target serangan utama yaitu sebanyak 13.532 kasus atau 71,96% dari 18.806 kasus, menyusul target pemerintah yang mencapai 3758 kasus atau 19,98%. Tabel yang sama juga memperlihatkan bahwa target-target militer justru cenderung tidak diprioritaskan.

---

<sup>23</sup> [www.mipt\\_terrorisme.co.id](http://www.mipt_terrorisme.co.id), diakses pada 2 Mei 2007.



Serangan teroris internasional di tahun 2002-2006 yang ditujukan langsung ke fasilitas-fasilitas militer hanya mengambil 0,47% (89 kasus) dari seluruh populasi serangan teroris.

**Tabel 1**  
**Jumlah Serangan Teroris Internasional**  
**terhadap Berbagai Jenis Fasilitas Internasional (2002-2006)**

Tahun	Bisnis	Diplomat	Pemerintah	Militer	Lain-lain	Total
2002	211	36	541	25	1835	2648
2003	191	59	468	8	1171	1897
2004	255	60	569	14	1748	2646
2005	248	62	1173	35	3458	4976
2006	264	41	1007	7	5320	6639
<b>Total</b>	<b>1169</b>	<b>258</b>	<b>3758</b>	<b>89</b>	<b>13532</b>	<b>18806</b>

Sumber: *MIPT Terrorism*, 2007

Deskripsi ketiga yang berguna untuk menemukan pola terorisme global adalah menemukan kawasan-kawasan yang rawan terhadap serangan teroris. Data yang dikemas dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar serangan terorisme internasional terjadi di dua kawasan: Timur Tengah dan Teluk Persia sebanyak 11140 kasus (59,24%) dan Asia Selatan sebanyak 3973 kasus (21,13%). Kawasan yang paling "aman" dari serangan terorisme adalah Asia Timur dan Asia Tengah yang hanya mengalami serangan terorisme sebanyak 51 kali (0,27%). Meningkatnya tingkat serangan di kawasan Timur Tengah dan Teluk Persia merupakan akses dari invasi dan penguasaan Amerika Serikat atas Irak dan Afganistan, yang semakin memperburuk hubungan Amerika Serikat dan Israel dengan sejumlah negara di kawasan itu.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Serangan Teroris Internasional per Kawasan (2002-2006)**

Kawasan	Tahun					Total
	2002	2003	2004	2005	2006	
Afrika	29	29	36	42	64	200
Asia Timur dan Tengah	12	13	15	8	3	51
Eropa Timur	215	125	169	155	130	794
Amerika Latin dan Karibia	477	199	107	148	152	1083
Timur Tengah dan Teluk Persia	626	497	1355	3042	4537	11140
Amerika Utara	16	18	8	14	4	60
Asia Selatan	811	610	463	883	1206	3973
Asia Tenggara dan Oceania	121	31	220	426	391	1189
Eropa Barat	341	375	273	258	152	1399
<b>Total</b>	<b>2648</b>	<b>1897</b>	<b>2646</b>	<b>4976</b>	<b>6639</b>	<b>18806</b>

Sumber: *MIPT Terrorism*, 2007

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM ASEAN

##### A. ASEAN

ASEAN atau Perkumpulan Negara-negara Asia Tenggara merupakan salah satu organisasi regional yang pembentukannya dipelopori oleh lima negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. ASEAN didirikan pada tanggal 15 Agustus 1967, dalam sebuah pertemuan yang dilakukan di Bangsaen, Thailand.

Tujuan dari pembentukan ASEAN sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi Bangkok antara lain:

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di wilayah itu melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan dan kemitraan untuk memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai.
- 2) Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan mentaati keadilan, tata hukum dalam hubungan antara bangsa-bangsa Asia Tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas Piagam PBB.
- 3) Memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam kepentingan bersama di dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik dan administrasi.
- 4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian dalam lingkungan pendidikan kejuruan, teknik dan administrasi.

- 5) Bekerjasama secara efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dari bidang-bidang pertanian, industri dan perdagangan mereka, termasuk pula mempelajari persoalan-persoalan perdagangan internasional dan bahan mentah, perbaikan pengangkutan dan komunikasi dan memepertinggi taraf hidup rakyat.
- 6) Memajukan studi tentang Asia Tenggara
- 7) Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang bertujuan sama.

Dalam struktur ASEAN seperti yang telah ditentukan dalam empat paragraf dari Deklarasi ASEAN, badan utama pengambil keputusan adalah Sidang Menteri Luar Negeri yang umum disebut *Ministerial Meeting*, yang bersidang sekali setahun dan bergiliran antara anggota. Sidang khusus para menlu dapat pula diadakan atas permintaan salah satu anggota.

Badan kedua yang terpenting adalah *Standing Committee*, yang bertugas mengadakan koordinasi dan meninjau kegiatan-kegiatan ASEAN diantara sidang-sidang Menlu. *Standing Committee* ini berkedudukan secara bergiliran, dengan dibantu oleh duta besar-duta besar ASEAN yang ditunjuk untuk negeri itu.

Sampai tahun 1976, ASEAN tidak mempunyai Sekretariat Pusat. Pada tempatnya yang masih ada sampai sekarang, dimasing-masing negara didirikan Sekretariat Nasional yang bertugas melayani badan-badan lain. Setnas ini merupakan bagian dan berfungsi dalam masing-masing Departemen/Kementerian Luar Negeri

dan bertindak terutama sebagai badan koordinasi dari kegiatan ASEAN yang berkaitan dengan negara masing-masing.<sup>24</sup>

Perkembangan hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik beberapa tahun terakhir ini telah membuat ASEAN tidak lagi menjadi objek dari persaingan negara-negara besar. Sebagai aktor penting dalam hubungan internasional di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, ASEAN kini semakin asertif dalam menghadapi masalah-masalah hubungan internasional dengan mencari pendekatan-pendekatan baru kerja sama secara lebih luas. Dari perkembangan kerja sama ASEAN selama tiga dasa warsa lebih, ASEAN semakin memainkan peran penting dalam hubungan politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya di antara bangsa-bangsa. Di samping itu ASEAN telah mampu mengembangkan daya adaptasinya menghadapi lingkungan politik dan ekonomi secara global yang akhir-akhir ini berubah secara cepat. Di masa mendatang ASEAN akan terus menghadapi berbagai tantangan sehingga keberadaan dan kelangsungan hidup ASEAN akan sangat tergantung pada tingkat kohesi ASEAN yang didasarkan atas ketahanan nasional negara-negara anggotanya.

Secara historis sejak pembentukan pada 8 Agustus 1967, ASEAN telah berhasil meningkatkan pengaruh diplomatiknya atas berbagai isu politik dan ekonomi internasional, menciptakan lingkungan strategis yang stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi resiko perang sehingga berhasil menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kini, sepuluh negara ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,

<sup>24</sup> M Sabir, *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.

Singapura, Thailand dan Vietnam, bertekad membentuk identitas tunggal kawasan, terlepas dari perbedaan budaya di masing-masing anggota. Melalui sebuah komunitas, ASEAN berjuang untuk mengubah statusnya dari sekedar "perhimpunan bangsa-bangsa" menuju ke satu kesatuan "masyarakat" yang terdiri atas bangsa-bangsa (*transforming itself from an "association of states" into a "real community of nations"*). Dengan kata lain, ASEAN memulai proses transformasi dari kumpulan negara yang berasosiasi ke arah komunitas kawasan yang lebih terintegrasi. Cita-cita integrasi ASEAN kian jelas, setelah para kepala negara ASEAN menetapkan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang tercantum dalam Bali Concord II yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC), dijadikan sebagai basis kerja sama ASEAN mendatang. Sebagai kelanjutan dari Bali Concord I 1976, Bali Concord II berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020, rencana aksi Hanoi 2004, inisiatif integrasi ASEAN, dan peta integrasi ASEAN 2020.

Namun demikian, dalam mencapai cita-cita integrasi ASEAN tersebut masih dijumpai persoalan mendasar, seperti misalnya, isu polusi asap sebagai akibat kebakaran hutan di Pekanbaru, Riau yang terjadi pada pertengahan Juni 2004. Meski dampak polusi asap ini meluas ke Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, namun Indonesia kurang memperhatikan secara serius. Padahal, rencana aksi ASC, menjamin adanya suatu penyelesaian bersama di dalam mekanisme kelembagaan ASEAN. Bagaimanapun, seharusnya isu ini menjadi tanggung jawab bersama ASEAN, karena telah menyentuh aspek *human security*, baik secara regional maupun

secara global. Apalagi isu polusi asap ini hampir tiap tahun muncul dan menimbulkan "sengketa" di antara anggota ASEAN itu.

## B. Kerjasama Komunitas Keamanan ASEAN

Secara teoritis komunitas keamanan adalah sekumpulan Negara yang anggotanya memiliki harapan timbal balik akan perubahan yang damai serta menolak penggunaan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi di Asia Tenggara.<sup>25</sup>

Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) merupakan suatu kerjasama keamanan di bidang keamanan yang diusulkan oleh Indonesia pada Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting*) yang ke 36 di Phnom Penh, Kamboja, pada tahun 2003.<sup>26</sup> Menyimak namanya Komunitas Keamanan ASEAN menyiratkan adanya suatu forum kerjasama militer. Namun, secara teoritis Komunitas Keamanan adalah sekumpulan Negara yang anggotanya memiliki harapan timbal balik akan perubahan yang damai serta menolak penggunaan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi di Asia Tenggara.

Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda, Komunitas Keamanan ASEAN akan menjadi forum kerjasama yang memiliki cakupan bidang kerjasama keamanan yang lebih luas, sementara kerjasama militer hanya merupakan salah satu aspek di dalamnya. Aspek-aspek lain yang tidak kalah penting dalam

<sup>25</sup> Vincensio Dugis, *Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN*, terdapat dalam <http://www.kompas.com>, tanggal 9 Agustus 2003, di download tanggal 20 April 2005.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Komunitas Keamanan ASEAN antara lain kerjasama untuk menciptakan aturan-aturan dalam berinteraksi dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN diperlukan untuk membarengi forum kerjasama ekonomi yang sudah berjalan semenjak awal pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Komunitas Keamanan ASEAN ini, kata Hasan Wirayuda, mencakup lima elemen pokok, yaitu pembangunan politik, pembentukan norma pergaulan kawasan, pencegahan konflik, penyelesaian konflik dan pembangunan dama pasca konflik. Dalam hal ini, keamanan diartikan sebagai kerjasama politik dan keamanan.

Melalui Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN akan merumuskan dengan konkrit kondisi ASEAN bagaimana yang ingin dicapai dari kerjasamanya di bidang politik dan keamanan dan menyepakati langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut sebelum atau pada tahun 2020 baik modalitas maupun program kerjanya. Dengan kata lain, dengan Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN akan membawa kerjasama politik dan keamanannya ke tingkat yang lebih tinggi (*higher plane*).

Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN berasal dari beberapa kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan oleh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan selama 36 tahun sejak berdirinya ASEAN. Dokumen utama kerjasama politik terutama yang ada nuansa keamanannya di ASEAN antara lain:

1. ASEAN Declaration. Bangkok, 8 Agustus 1967.



2. *Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration (ZOPFAN)*. Kuala Lumpur, 27 Nopember 1971, pembentukan ZOPFAN dimaksudkan untuk menutup peluang bagi segala bentuk intervensi dan campur tangan pihak luar sehingga negara-negara ASEAN dapat melaksanakan rencana pembangunan masing-masing dalam suasana damai.
3. *Declaration of ASEAN Concord*. Bali, 24 Februari 1976, berisikan berbagai program yang akan menjadi kerangka kerja sama ASEAN selanjutnya di bidang politik, ekonomi atau pembangunan, sosial, kebudayaan atau informasi, dan keamanan. Di bidang ini secara khusus disepakati cetak biru untuk mewujudkan ZOPFAN.
4. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Bali, 24 Februari 1976, disepakati diantaranya prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan satu sama lain seperti tindak campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perbedaan dan sengketa secara damai dan penolakan terhadap ancaman dan pemakaian kekerasan juga dimuat kemungkinan memanfaatkan sebuah *high council* yang terdiri dari wakil-wakil setingkat menteri negara-negara anggota antara lain untuk berperan dalam menyelesaikan sengketa di antara anggota.
5. *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Manila, 22 Juli 1992 yang menegaskan perlunya penyelesaian secara damai masalah kedaulatan dan yuridiksi di Laut Cina Selatan, perlunya kerjasama keselamatan pelayaran, komunikasi, pencegahan polusi, SAR, dan lain-lain.

6. *The ASEAN Regional Forum : A Concept Paper*. Bandar Sri Begawan, 1 Agustus 1995. Dokumen ini menjadi dasar didirikannya ARF sebagai sarana dialog keamanan regional yang didukung Negara-negara besar dan ASEAN sebagai penggeraknya.
7. *Treaty of South Asia Nuclear Weapon-Free Zone*. Bangkok, 15 Desember 1995 (SEANWFZ). Perjanjian ini bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir (KBSN AT) yang merupakan komponen ZOPFAN dan sebagai suatu prasyarat bagi perwujudannya.
8. *ASEAN Vision 2020*. Kuala Lumpur, 15 Desember 1997. Dokumen ini menguraikan visi ASEAN untuk terciptanya *ASEAN Community* dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk tujuan tersebut yaitu suatu ASEAN yang merupakan *a concept of nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies*.
9. *Rules of Procedures of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Hanoi, 23 Juli 2001.
10. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*. Bandar Sri Begawan, 5 November 2001, disusul kemudian dengan *Declaration on Terrorism by the Summit ke-18, Pnom Penh 3 November 2002*.
11. *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea*. Pnom Penh, 4 November 2002. Deklarasi ini ditandatangani oleh para Menlu ASEAN

dan Menu RRC. Sesuai dengan judulnya Deklarasi memuat cara-cara bertindak para pihak dalam interaksi mereka mengenai isu-isu yang menyangkut Laut China Selatan.

Komunitas keamanan ASEAN merupakan suatu kelanjutan yang wajar dan logis oleh ASEAN pada bidang kerjasama politik dan keamanan. Langkah ini merupakan suatu tahapan dari proses dan pengalaman kerjasama di bidang keamanan yang telah dibangun secara bertahap sejak berdirinya ASEAN. Sebagai kelanjutan dan peningkatan kerjasama politik dan keamanan yang sudah ada selama ini di kalangan Negara-negara ASEAN, prinsip-prinsip tersebut dibuat menjadi relevan dengan menyesuaikan perkembangan realitas regional dan dengan lingkungan strategis yang ikut membentuk dan mempengaruhi tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN.

Prinsip-prinsip terpenting yang harus dipertahankan dalam Komunitas Keamanan ASEAN termasuk :

1. Menghormati kedaulatan sesama anggota. Prinsip ini akan tetap merupakan prinsip paling tinggi yang mengatur hubungan satu sama lain dengan pengertian bahwa dimana perlu Negara-negara anggota memberi wewenang tertentu kepada ASEAN sebagai lembaga.
2. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota, penerapannya perlu dilakukan secara fleksibel sesuai dengan semangat kerjasama dalam Komunitas Keamanan ASEAN.

3. Pengambilan keputusan secara Konsensus. Mungkin ASEAN harus membedakan antara isu penting yang memang memerlukan keputusan consensus dan isu-isu teknis yang dapat diputuskan dengan pendekatan lain.

## B. Aksi Terorisme di Asia Tenggara

Peristiwa kelam 11 September 2001 menjadi amanat bahwa tidak satu negara pun yang luput dari ancaman terorisme jika meninggalkan kewaspadaan. Sekalipun negara sekaliber Amerika Serikat. Peristiwa 11 September juga mengungkap sisi internasional dari sebuah aksi terorisme, yaitu para pelakunya yang tidak hanya terdiri dari satu kewarganegaraan saja, melainkan sebuah jaringan *hydranik* yang terpecah ke berbagai pelosok dunia.

Peristiwa itu juga menyadarkan dunia bahwa kelompok Islam radikal atau militan dapat menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan global. Serangan teroris atas sasaran sipil dan militer di Amerika Serikat tersebut telah meningkatkan kekhawatiran terhadap keberadaan perkembangan kelompok-kelompok Islam militan di seluruh penjuru dunia, termasuk di Asia Tenggara.

Hampir seluruh negara di Asia Tenggara merasakan adanya pengaruh negatif dari keberadaan kelompok-kelompok militan di wilayahnya. Indonesia sebagai negara ASEAN dengan jumlah umat Islam terbesar memang selama ini menjalankan syariat Islam dengan moderat. Namun, tentu diantara moderatnya 200-an juta jiwa penduduk muslim Indonesia, keberataan minoritas garis keras tetap dirasakan

mengganjal dan siap menjadi titik api konflik di kemudian hari. Terbukti kemudian dalam peristiwa rentetan bom dari bom Bali hingga bom Kuningan yang kesemuanya meminta korban ratusan jiwa.

Demikian pula dengan Filipina, negara tetangga Indonesia ini sudah kurang lebih 35 tahun berperang dengan gerilyawan muslim Moro MILF. Bahkan kebijakan keras Manila terhadap Islam ekstrimis pimpinan Nur Misuari tersebut berkali-kali mengganggu hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lainnya. Thailand dan Malaysia juga sempat berselisih paham mengenai keberadaan kelompok radikal Islam yang kerap melakukan aksi teror di kedua negara. Kelompok militan *Raudatul Amien* tersebut terkonsentrasi di wilayah selatan Thailand, akan tetapi dimotori oleh tokoh-tokoh berkewarganagaraan Malaysia.

Berbeda dengan kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat, aksi terorisme di wilayah Asia Tenggara tergolong minim. Hal ini diduga erat kaitannya dengan *genesis* terorisme yang pada hakikatnya adalah semangat pembebasan dari imperialisme, sedang negara-negara Asia Tenggara sendiri identik dengan sebagai korban koloalisme dan imperialisme di masa lalu. Sejauh ini memang ditinjau dari segi kuantitas, Asia Tenggara tidak separah kawasan lain. Dalam sebuah survei disebutkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir Asia Tenggara "hanya" mengalami 186 kali aksi teroisme. Angka tersebut jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan 2.073 kejadian di negara-negara Eropa, 1.621 kejadian di Amerika Latin, 1.292 kejadian di Asia Barat, atau 1.362 kejadian di Afrika.<sup>27</sup> Itupun dari segi

---

<sup>27</sup> Ahmad Farid, *Terrorism in South East Asia; How Real is the Threat*, The Indonesia Quarterly, Vol 30, First Quater, 2002, hal. 38.

kualitas, aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara kurang mendapat ekspos ketimbang aksi teror di kawasan-kawasan lainnya.

Kalaupun sempat terjadi aksi terorisme mengejutkan seperti pembajakan pesawat di kawasan Asia Tenggara, maka satu-satunya peristiwa adalah pembajakan pesawat milik Garuda Indonesia di Don Muang, Thailand, 28 Maret 1981. Aksi tersebut dilakukan oleh lima orang yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari kelompok Islam garis keras Indonesia, "Komando Jihad", yang sudah melakukan berbagai aksi sabotase terhadap fasilitas-fasilitas milik pemerintah Indonesia semenjak pertengahan 1970-an. Semula Thailand menolak dengan halus penggunaan militer asing di wilayah teritorialnya. Akan tetapi setelah melalui tekanan Amerika Serikat dan berkat pengertian semangat kebersamaan ASEAN, Thailand memperbolehkan Indonesia melakukan operasi komandi di teritorialnya guna membebaskan para penumpang dan awak pesawat tersebut. Operasi militer yang dieksekusi oleh 35 pasukan khusus Indonesia itu berhasil membebaskan semua sandera kendati menewaskan pilot pesawat dan melukai seorang regu penyelamat.<sup>28</sup> Sejak peristiwa pembajakan tersebut praktis tidak ada tindak terorisme yang mengejutkan di wilayah Asia Tenggara hingga dekade 2000-an.

Pasca perubahan struktural di Indonesia pertengahan 1998 barulah terdengar kembali tindak kekerasan bernuansa terorisme yang menelan korban jiwa. Bulan Agustus 2000 sebuah bom plastik C4 menghancurkan kedutaan besar Filipina,

<sup>28</sup> Mario Rustan, *The Hijacking of Flight GA 206, 28 March 1981*, The Special Operations Paper.

beberapa hari sebelum bom berkekuatan sedang meledak di gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menewaskan 10 orang. Tiga bulan kemudian serangkaian ledakan bom di berbagai kota terjadi pada malam natal 24 Desember 2000. Beberapa waktu kemudian giliran Graha Cijantung diledakkan tak lama berselang dengan serangkaian ledakan bom serupa di Makati, Filipina, Juni 2002.

Atas maraknya aksi teror di wilayah Asia Tenggara, mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, pada surat kabar berpengaruh *The Strait Times* mengungkapkan keprihatinannya atas sikap lamban pemerintah yang belum juga menangkap tokoh-tokoh teroris yang berada di Indonesia. Lee juga menyebut bahwa aks-aksi pengeboman di sebuah pusat perbelanjaan di Singapura awal Juli 2002 akibat tidak adanya kerjasama antar negara sekawasan untuk mengantisipasi aksi terorisme. Salah satu indikasinya adalah pelaku peledakan merupakan warga negara Malaysia dengan bahan peledak sejenis dengan Bom Atrium Senen dan Balaikota Makati.<sup>29</sup> Pernyataan pejabat senior Singapura tersebut ditanggapi keras oleh Indonesia hingga hubungan bilateral keduanya sempat memanas.

Hanya berselang setahun setelah peristiwa gedung kembar *World Trade Centre* di Amerika Serikat, Asia Tenggara kembali dikejutkan oleh aksi terorisme spektakuler. Ledakan bom di Kuta, Bali, yang menelan korban jiwa ratusan orang adalah tindak terorisme terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Peristiwa tersebut seolah menyadarkan semua pihak bahwa tindak terorisme bisa terjadi kapan dan

<sup>29</sup> *Protest of The Prime Minister, The Strait Times. 22 Agustus 2002*

dimana saja. Tindak terorisme tidak memilih-milih tempat, apakah ia dilakukan di negara yang sedang bermusuhan dengan negara asal para pelaku terorisme ataukah di negara yang selama ini sudah dipusingkan dengan urusan dalam negeri seperti Indonesia.

Peristiwa bom Bali 12 Oktober 2001 telah meninggalkan pesan bahwa tidak ada satu pun kawasan di dunia yang aman dari serangan teroris. Itu berarti Asia Tenggara termasuk salah satu kawasan yang rawan serangan maupun tindak pidana terorisme lainnya. Ledakan bom di Bali 12 Oktober 2001 yang mengejutkan masyarakat internasional sebenarnya merupakan satu peristiwa yang dapat diperkirakan sebelumnya andaikata negara-negara ASEAN telah menerapkan kerjasama intelijen untuk mengantisipasi aksi terorisme yang dimaksud resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373. Indikasi-indikasi ke arah itu sebenarnya sudah nampak. Beberapa hari sebelum peristiwa ledakan, pemerintah Amerika Serikat sudah mengingatkan akan ada serangan teroris kepada kedutaan-kedutaan besarnya di negara-negara Asia Tenggara. Dua hari sebelum kejadian Amerika Serikat mengancam akan menarik seluruh korps diplomatiknya di Indonesia jika negara itu tidak serius menanggapi peringatannya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralph L. Boyce didampingi Direktur CIA untuk kawasan Asia Tenggara menyampaikannya secara langsung kepada Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto. Sayangnya reaksi para elit pemerintahan Indonesia cenderung negatif. Permintaan bantuan keamanan ekstra dari sejumlah kilang minyak milik Amerika Serikat ditanggapi dingin. Para elit politik negara itu pun menganggap isyarat serius



Amerika Serikat sebagai propaganda biasa yang sudah umum dilakukan. Pernyataan terpisah kedua pimpinan parlemen Indonesia Amien Rais dan Akbar Tanjung bernada serupa, balik mengancam, jika Amerika Serikat menarik staf kedutaannya, maka Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Mereka melupakan etika protokuler pergaulan internasional bahwa jika suatu peringatan disampaikan secara resmi dan diikuti dengan upaya penarikan warga diplomatiknya berarti negara bersangkutan sangat serius.

Selang beberapa hari setelah ledakan bom Bali otoritas keamanan Singapura menahan para tokoh *Rabiatul Mujahidien*, yang digolongkan sebagai sel jaringan Al-Qaeda. Menurut pemerintah Singapura dari pengakuan para tersangka disebutkan aksi-aksi terorisme di Asia Tenggara erat kaitannya dengan upaya penciptaan Pan Islam yang meliputi Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Untuk melancarkan rencana tersebut mereka akan mengadakan teror terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara dan mengobarkan isu-isu rasialis, etnisitas, agama dan sebagainya, karena cara-cara itulah yang dipandang efektif untuk menghancurkan wibawa *status quo*.

Selang beberapa hari kemudian pemerintah Malaysia menangkap 10 orang anggota Majelis Mujahiddin yang menurut pemerintah setempat ingin membentuk sebuah negara Islam yang mirip dengan pemerintahan Taliban di Afghanistan.<sup>30</sup> Dari kesepuluh orang tersebut, sasaran utama Malaysia adalah tokoh muda Majelis

---

<sup>30</sup> *Malaysia melancarkan perang terhadap terorisme*, Kompas, 20 Agustus 2002

Mujahiddin bernama Adli Nik Abdul Azis yang diduga kuat merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Mahathir dan terlibat dalam pengiriman Laskar Jihad Malaysia ke Maluku, Indonesia, yang tengah dilanda konflik SARA. Bersama 9 orang rekannya, Abdul Azis dikenakan hukuman dua tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional (ISA) yang memang mengizinkan pemerintah melakukan penahanan terhadap setiap pelaku ancaman tanpa perlu proses hukum.

Latar pergerakan kelompok Islam militan di Asia Tenggara merebak sejak akhir tahun 1980-an dengan dipelopori oleh para mantan mahasiswa Malaysia dan Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Pakistan saat terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Mereka menentang invasi tersebut dan bergabung dalam kamp-kamp mujahidin Afghan, termasuk Taliban pimpinan Mohammad Omar. Banyak diantara mereka yang terpengaruh oleh ajaran dan metode pergerakan pemimpin Taliban tersebut sehingga saat kembali ke tanah air masing-masing para veteran Mujahiddin ini terinspirasi untuk menegakkan *Daurah Islamiyah* berdasarkan syariat Islam konservatif dan meruntuhkan pemerintahan sekuler. Oleh karena itu tidak salah jika kemunculan kelompok-kelompok Islam militan di Asia Tenggara muncul dari Afghanistan meski belum ada kaitannya dengan Tanzim Al-Qaeda pimpinan Bin Laden. Informasi tentang aktivitas Al-Qaeda dan kelompoknya di Asia Tenggara mulai terungkap setelah jatuhnya pemerintahan Taliban di Afghanistan. Badan intelijen nasional Amerika Serikat CIA mengirimkan informasi bahwa satuan-

satuan khusus Amerika Serikat banyak mendapati anggota pasukan Taliban yang berasal dari Asia Tenggara.

Tragedi Bali pada akhirnya menjadi semacam lonceng yang dengan suara nyaring mengeskakan bahwa memang jaringan terorisme ada di kawasan Asia Tenggara. Tidak ada satu pun pemimpin negara ASEAN bisa dikatakan demikian yang berani menyatakan bahwa tidak ada aksi terorisme di negaranya. Filipina dicekam ketakutan setelah terjadi lima ledakan bom yang hampir bersamaan di Metropolitan Manila yang menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 200 orang lainnya. Itulah sebabnya, Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo secara tegas juga menyatakan perang terhadap terorisme. Aparat keamanan sendiri kemudian membekuk Dompok Ijajil Faisal yang dituduh sebagai pelaku pengeboman tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka Faisal adalah salah seorang anggota *Abu Sayyaf*. Tidak berapa lama kemudian, aparat keamanan Filipina kembali melakukan penangkapan. Kali ini giliran warga negara Indonesia bernama Fathur Rahman Al-Ghozi yang dicituk di perkampungan muslim Manila. Al Ghozi ditahan atas keanggotaanya di Jamaah Islamiyah disamping tuduhan menyelundupkan bahan peledak dan senjata api ke Filipina.<sup>31</sup>

Indonesia justru melakukan hal yang sebaliknya. Yang terjadi di negara itu malah kampanye anti-Barat, termasuk aksi *sweeping* terhadap warga asing di berbagai kota. Beberapa jam setelah ledakan, tuduhan segera diarahkan pada badan

<sup>31</sup> Jakarta Minta Ekstradisi Teroris, Media Indonesia, 28 Agustus 2002

inteijen Amerika Serikat CIA atau Mossadnya Israel sebagai pelaku bom Bali. Lebih tepatnya opini yang berkembang dari elit politik hingga masyarakat umumnya mengarah pada kerjasama elemen-elemen tertentu yang tidak puas di tubuh militer (TNI) dengan CIA atau Mossad. Tujuannya memermalukan pemerintah saat itu. Maka inilah jalan bagi kalangan militer pro Amerika Serikat dan Yahudi untuk kembali tahta kekuasaan. Opini umum lainnya yang tak kalah *simplistic* menyebut elemen-elemen garis keras di tubuh militer (TNI) yang justru bekerjasama dengan jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara (Jamaah Islamiyah) untuk mendongkel kalangan pro Amerika Serikat dan Israel. Kerjasama ini telah terbina sejak konflik kemanusiaan di Maluku dan Poso dengan metode yang sama untuk menurunkan pemerintah yang dianggap korup dan tak berwibawa. Tidak heran jika insiden pecah di Ambon dan Poso sesaat setelah ledakan bom di Bali.

Proses disinformasi berkembang demikian cepat sehingga tersebar sebagai persepsi umum dan membentuk opini publik di Indonesia. Amerika pun menjadi berang dan sebagai tanda kemarahannya Amerika Serikat memanggil pulang sebagian besar staf kedutaan, menghentikan segala bentuk kerjasama kemitraan yang mengakibatkan dipulangkannya empat instruktur tamu asal Amerika Serikat di kepolisian Sumatera Selatan, dan menghimbau seluruh warga negaranya untuk meninggalkan Indonesia. Belum cukup, Amerika juga memindahkan impor produk hasil tekstilnya ke Republik Rakyat Cina, sehingga membuat dunia tekstil Indonesia tenggelam dalam krisis.

Dampak terburuk yang diterima Indonesia bukan hanya sekedar tekstil, melainkan kehancuran industri pariwisata. Para wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali dalam kondisi normal mencapai 5000 orang, kini hanya sekitar 1500 orang.<sup>32</sup> Jika dikalkulasi selama ini seorang wisatawan membelanjakan rata-rata 400 US \$, maka Indonesia kehilangan pendapatan pariwisata sebesar 600.000 US \$ atau sekitar 5,4 miliar rupiah setiap harinya. Angka tersebut belum termasuk kerugian gulung tikarnya industri pariwisata seperti berbagai *home industry* cinderamata, perusahaan-perusahaan penyewaan dan menurunnya tingkat hunian hotel yang berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Reaksi positif Indonesia terhadap pemberantasan terorisme walau dinilai lamban akhirnya muncul. Menanggapi tuntutan internasional akan perlunya sebuah perangkat hukum untuk menjerat para pelaku terorisme, pemerintah Indonesia pun mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu tindakan nyata yang diambil Jakarta adalah penangkapan terhadap pimpinan pusat Majelis Mujahidin Abdullah Abu Bakar Ba'asyir. Menurut kepolisian ditangkap atas tuduhan melakukan perintah aksi-aksi terorisme dan rencana pembunuhan presiden Megawati. Sedangkan oleh Malaysia dan Singapura, Ba'asyir dituduh sebagai dalang berbagai peristiwa teror yang dilancarkan oleh kelompok Jamaah Islamiyah dan sel Al-Qaeda lainnya

---

<sup>32</sup> Pemerintah Niat Menggelar Konser Akbar di Bali, Kompas, 20 Oktober 2002.

bersama pucuk pimpinan lainnya bernama Hambali yang diringkus CIA di New York pertengahan Agustus 2003.<sup>33</sup> Menurut CIA, Hambali diduga kuat adalah komandan operasi Al-Qaeda untuk kawasan Asia Tenggara.

Upaya pemberantasan terorisme di Indonesia mencapai momentumnya ketika pada 9 November 2005, gembong terorisme di Asia Tenggara, Dr Azhari tertembak mati melalui serangkaian upaya penyergapan yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia di Batu, Malang. Selama ini, pihak kepolisian kerap disudutkan atau dipojokkan sebagai lembaga penegak keamanan yang buruk akibat seringnya kecolongan oleh kalangan pelaku teroris, atau akibat kelambanannya dalam mengungkap kasus-kasus kriminal di Indonesia. Oleh karena itu, penggerebekan sarang Azahari ini menjadi penghias 'emas' terhadap citra aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional dan kawasan Asia Tenggara. Secara normatif, dengan terbunuhnya Azahari ini paling tidak memunculkan optimisme berbagai pihak bahwa kekacauan atau terorisme di Indonesia dan juga di kawasan Asia Tenggara semakin berkurang.

Menurut Darmawan<sup>34</sup>, dalam konteks ini, ada 4 (empat) analisis hipotesis, yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses penggerebekan ini bisa dilakukan.

<sup>33</sup> *CIA Tangkap Warga Indonesia*, Kompas 15 Agustus, 2003.

<sup>34</sup> Cecep Darmawan. *Azahari dan Terorisme di Indonesia*. Opini dimuat di *Pikiran Rakyat*, Senin 14 November 2005

*Pertama*, cepatnya pengungkapan dan penggerebekan komplotan Azahari karena sigap dan cepat tindaknya pihak kepolisian RI dalam mengejar pelaku pengebomban Jimbaran Bali (bom Bali II). Melalui gerakan yang cepat dalam mengejar, menyusut, dan membaca gerak perjalanan para pelaku bom Bali II, pihak polisi mampu menemukan jejak gerakan kelompok teroris. Kapolda Bali, I Made Mangku Pastika, menyakini akan kebenarannya sejarah perkembangan proses penggerebekan Azahari dengan model ini. Dengan tegas, Pastika mengatakan bahwa penggerebekan ini dimulai dari terungkapnya pelaku bom Bali II. Pada waktu pelaku bom Bali II ditemukan, sebenarnya gerakan pelaku teror sudah mulai tercium, hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penggerebekannya.

Dari analisis ini, hal yang mau ditekankan adalah adanya kompetensi intelijen kepolisian (juga TNI) dalam menyusut dan menelusuri sejarah pergerakan kelompok teroris. Dengan kata lain, pernyataan ini hanya ingin menekankan bahwa penggerebekan terjadi, karena adanya kemampuan prima dari kepolisian dalam membaca tanda dan gerakan kalangan teroris.

*Kedua*, "teori" partisipasi masyarakat. Walaupun agak lemah, untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam mengungkap proses penggerebekan komplotan Azahari ini, namun ide tentang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi keberadaan kaum teroris tetap memiliki pijakan strategis. Artinya, pendekatan ini penting dan strategis, walaupun belum menunjukkan keakurasian dan validitas yang kokoh dalam mendukung proses penggerebekan kelompok Azahari yang lalu. Lemahnya partisipasi masyarakat (sekitar) dalam mendukung penggerebekan ini,

ditunjukkan oleh adanya ketidaktahuan para pemilik rumah kost-an di Batu Malang, dan masyarakat sekitar terhadap identitas si pengontrak rumah tersebut. Mereka hanya tahu, bahwa yang ngontrak di rumah tersebut adalah seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Malang, yang bernama Yahya Antoni. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengungkapan gembong Azahari (catat: dalam penggerebekan kemarin), masih disangsikan.

*Ketiga*, teori kader *mbalelo*. Terbongkarnya sarang teror, selain dimungkinkan karena adanya kemampuan Polri dan TNI dalam mengungkap gerak perjalanan kaum teroris, adalah dimungkinkan pula karena adanya kader teror yang tidak militan. Dengan lahirnya, kader-kader yang tidak militan, dapat menyebabkan bocornya rahasia dari kader teroris tersebut menjadi sangat besar dan dimungkinkan.

Ada dua kategori dari kader yang *mbalelo* ini, satu pihak dapat dikategorikan sebagai kader yang masih "mentah" (kurang militan), dan satu pihak lagi dapat dimaknai sebagai kader sisipan atau susupan. Untuk skala perang besar, mata-mata (spionase) adalah pencari dan pembocor rahasia musuh. Dan, kelompok ini dapat dikatakan sebagai kader "*membalelo*". Dalam konteks Azahari, kader yang *membalelo* ini, mungkin karena adanya kader yang masih mentah, atau kader sisipan dari kelompok luar sehingga membocorkan rahasia gerakan terorisnya.

Selain yang sudah tertangkap hidup-hidup, pasca gerakan bom Bali I para pelaku teror kerap melakukan bom bunuh diri, atau terbunuh bersamaan dengan ledakan bom tersebut. Modus seperti ini, mau tidak mau semakin mengurangi kader-kader teror kelompok Azahari. Kemudian para analisis, menyatakan bahwa kuatnya



kelompok Azahari bersembunyi selama hampir 3 tahun di Indonesia, karena Azhari c.s. mampu merekrut kader baru yang dijadikan tempat persembunyian atau pelaku teror yang baru. Andai saja, analisis mengenai perekrutan kader baru oleh Azahari c.s. ini adalah benar, dan terus dilakukan oleh Azahari maupun Noordin Moh. Top sehingga kedua pelaku utama bom Bali ini, maka mereka mampu bertahan dan bersembunyi secara terus-menerus melakukan teror di Indonesia.

Hanya sayangnya bila dilihat dari persepektif pendidikan dan pembinaan mental, perekrutan dan pembinaan mental kader dalam waktu yang singkat (*instan*), memungkinkan melahirkan kader yang lemah, yang kurang memiliki mental teroris yang tinggi, sehingga memudahkan dirinya untuk membuka atau membocorkan rahasia. Mungkin inilah, yang kemudian ditunjukkan oleh Khalili, salah satu pelaku teror yang ditangkap di Vila Nova. Dari informasi orang inilah, kemudian gerak perjalanan teroris di Indonesia dapat dengan mudah ditemukan.

*Keempat*, hipotesis kalangan intelijen yang menyatakan bahwa sempat terjadi ada pertemuan pelaku teror yang melahirkan kesepakatan syawal (Dialog Metro TV, 11/11/05). Kesepakatan syawal ini, mengandung isi bahwa sepanjang tidak diburu lagi oleh kalangan penegak hukum, kaum teroris tidak akan melakukan aksi teror kembali. Pada satu sisi, mungkin ini adalah taktik teroris dalam mengulur waktu, dan pada sisi yang lain, dapat dimaknai gejala melemahnya kekuatan dan soliditas kaum teroris Indonesia. Mengenai melemahnya soliditas kaum teroris ini, relevan dengan (a) kian berkurangnya kuantitas kader, dan (b) berkurangnya militansi kader muda kaum teroris.

Mencermati hipotesis keempat ini, maka penggerebekan sarang teroris dapat dimaknai sebagai bukti bahwa sarang kaum teror pada dasarnya sudah diketahui cukup lama, hanya tinggal nunggu waktu, atau di sisi lain dapat dimaknai bahwa peristiwa penggerebekan ini merupakan bentuk sikap ketidakpercayaan pihak kepolisian terhadap substansi kesepakatan, sehingga lebih baik diserang lebih dulu, daripada menunggu munculnya serangan teror yang akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi.

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Peran Komunitas Keamanan ASEAN dalam Menghadapi Masalah Terorisme di Asia Tenggara

Masalah terorisme merupakan salah satu tema penting dalam percaturan dunia saat ini. Meski berbagai serangan di berbagai belahan dunia terus terjadi dalam dua dekade terakhir ini, namun puncak dari semua aksi itu mencapai momentumnya ketika terjadi serangan atas *World Trade Centre* (WTC) dan Pentagon yang merupakan markas pertahanan Amerika Serikat pada 11 September 2001. Peristiwa ini menandai dimulainya abad ke-21 sebagai abad teroris dan berdampak pada sejumlah peristiwa penting lainnya, seperti invasi Amerika Serikat ke Afganistan pada tahun 2002, dan kemudian ke Irak setahun kemudian dan diberlakukannya kebijakan uniteralisme dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri Amerika yang cenderung unilateralis, imperialis dan menekankan isu terorisme setelah 11 September 2001 memiliki dampak yang bersifat global. Setelah 11 September, Presiden Bush bersumpah "tak hanya akan menghukum teroris, tapi juga negeri-negeri yang melindungi teroris". Di berbagai penjuru dunia, tak hanya di Asia Tenggara, banyak negara sangat serius menyimak ancaman Amerika itu, baik didorong oleh motif solidaritas terhadap Amerika (yang terserang teror) maupun terpaksa melakukannya karena tekanan politik Amerika.

Dalam perkembangannya banyak negara Asia Pasifik mengadopsi UU Anti-Terrorisme yang cenderung "notorious", termasuk negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Malaysia dan Singapura yang lama telah menerapkan *Internal Security Act*, mirip UU Anti-Subversi di Indonesia dulu. Indonesia pun belakangan ini membuat Perpu Anti-Teroris setelah Teror di Bali.

Amerika juga memperbaharui kembali dan meningkatkan hubungan militer dengan negeri-negeri di kawasan ini. Di Filipina misalnya, Amerika memperkuat kehadiran pasukannya setelah "terusir" dari situ sejak jatuhnya Ferdinand Marcos. Dan di Indonesia, Amerika juga mencabut embargo bantuan serta penjualan peralatan militer yang terhenti setelah pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor Timur. Amerika Serikat juga mengkaitkan bantuan ekonomi dengan "prestasi" dalam perang melawan teror.

Target penting dari kebijakan anti-terorisme Amerika Serikat ini adalah sejumlah kelompok-kelompok militan, yang tidak hanya berasal dari Timur Tengah, namun juga dari berbagai kawasan dunia lainnya, termasuk dalam hal ini Asia Tenggara. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara merasakan adanya pengaruh negatif dari keberadaan kelompok-kelompok militan di wilayahnya. Indonesia sebagai negara ASEAN dengan jumlah umat Islam terbesar memang selama ini menjalankan syariat Islam dengan moderat. Namun, tentu diantara moderatnya 200-an juta jiwa penduduk muslim Indonesia, keberataan minoritas garis keras tetap dirasakan mengganjal dan siap menjadi titik api konflik di kemudian hari. Terbukti

kemudian dalam peristiwa rentetan bom dari bom Bali hingga bom Kuningan yang kesemuanya meminta korban ratusan jiwa.

Demikian pula dengan Filipina, negara tetangga Indonesia ini sudah kurang lebih 35 tahun berperang dengan gerilyawan muslim Moro MILF. Bahkan kebijakan keras Manila terhadap Islam ekstrimis pimpinan Nur Misuari tersebut berkali-kali mengganggu hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lainnya. Thailand dan Malaysia juga sempat berselisih paham mengenai keberadaan kelompok radikal Islam yang kerap melakukan aksi teror di kedua negara. Kelompok militan *Raudatul Amien* tersebut terkonsentrasi di wilayah selatan Thailand, akan tetapi dimotori oleh tokoh-tokoh berkewarganagaraan Malaysia.

Meski demikian, berbeda dengan kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat, aksi terorisme di wilayah Asia Tenggara sebenarnya tergolong minim. Hal ini diduga erat kaitannya dengan *genesis* terorisme yang pada hakikatnya adalah semangat pembebasan dari imperialisme, sedang negara-negara Asia Tenggara sendiri identik dengan sebagai korban koloalisme dan imperialisme di masa lalu. Sejauh ini memang ditinjau dari segi kuantitas, Asia Tenggara tidak separah kawasan lain. Dalam sebuah survei disebutkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir Asia Tenggara "hanya" mengalami 186 kali aksi teroisme. Angka tersebut jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan 2.073 kejadian di negara-negara Eropa, 1.621 kejadian di Amerika Latin, 1.292 kejadian di Asia Barat, atau 1.362 kejadian di Afrika. Itupun dari segi kualitas, aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara kurang mendapat ekspos ketimbang aksi teror di kawasan-kawasan lainnya.

Peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada 5 Agustus 2003, kian membuktikan bahwa sel-sel teroris di Asia Tenggara adalah sel-sel yang sangat aktif. Tingginya aktivitas dan mobilitas kaum teroris ini terlihat dari banyaknya jumlah tersangka teroris di berbagai negara ASEAN, terutama di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia, yang kemudian ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Di Malaysia saja kini terdapat hampir seratus tersangka teroris yang berafiliasi pada Kelompok Jemaah Islamiyah (KJI) yang ditahan berdasarkan Undang- Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act/ISA) yang keras. Sementara itu, Indonesia tengah menahan lebih dari 30 tersangka teroris yang terlibat dalam kasus bom Bali. Sebagian telah selesai diadili, di mana tiga di antaranya, yakni Imam Samudra, Amrozi, dan Muklas alias Ali Gufron, sudah divonis hukuman mati.

Keberadaan sejumlah ekstrimis dan terjadinya berbagai aksi teroris di Asia Tenggara merupakan masalah tersendiri bagi ASEAN, sebagai sebuah organisasi regional yang memayungi kawasan ini. Sikap saling curiga dan menuduh antar negara ASEAN kerap terjadi, yang menunjukkan kurangnya komunikasi antarnegara, baik melalui wadah ASEAN maupun secara bilateral. ASEAN seakan tidak memiliki "gigi" dalam menghadapi masalah ini karena senantiasa diperhadapkan pada prinsip non-intervensi atau biasa dikenal sebagai *ASEAN Way*, yang berakibat pada kehatian organisasi ini dalam bergerak lebih jauh dalam menyelesaikan masalah terorisme, khususnya yang terjadi di kawasan.

Apalagi kemudian masalah terorisme menjadi ancaman keamanan dan stabilitas regional yang jauh lebih sulit ditebak, karena sifatnya yang *amorf*, tidak

berbentuk serta tidak mengakui batas-batas negara dan kedaulatan dalam operasinya. Berbagai badan sebelumnya telah dibentuk untuk mengkoordinasikan pemberantasan terorisme di Asia Tenggara, tetapi kaitan antara badan-badan itu tidaklah jelas. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*, yang terdiri dari menteri-menteri dalam negeri, merupakan badan pembuat kebijakan tertinggi di bawah KTT ASEAN. Badan ini membawahi polisi, bea cukai, imigrasi dan badan-badan lain seperti kejaksaan agung. Disamping itu dibentuk pula *ASEAN Centre for Combating Transnational Crime (ACTC)*. Tetapi koordinasi antara badan-badan itu tidak jelas. Akibatnya, respons negara terhadap masalah terorisme cenderung ditangani secara ad hoc, misalnya oleh kelompok ahli atau LSM.

Kerja sama untuk menumpas terorisme juga terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dalam rangka hubungan bilateral lainnya. Kerja sama ini antara lain dilakukan dalam hubungan antara Brunei dan Filipina. Dalam pertemuan bilateral di Manila, awal tahun 2003, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo berikrar akan meningkatkan kerja sama dalam perang melawan terorisme. Kerja sama ini antara lain akan diwujudkan dalam bentuk latihan bersama antara angkatan laut kedua negara. Seperti diketahui, daerah Filipina bagian selatan, selain berdampingan dengan wilayah Malaysia juga berbatasan dengan wilayah perairan Brunei, merupakan daerah rawan kegiatan terorisme karena keberadaan kelompok-kelompok militan separatis, antara lain kelompok Abu Sayyaf, yang diduga terkait dengan jaringan Al Qaeda.

Dalam kerangka ASEAN berbagai upaya untuk pemberantasan terorisme juga kerap dilakukan. Dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa (UE) ke-14 yang diselenggarakan di Brussels, Belgia, awal tahun 2003, misalnya, ASEAN dan UE sepakat memperkuat kerja sama dalam memberantas terorisme internasional dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pertemuan itu, ASEAN dan UE juga sepakat mengadopsi Deklarasi Bersama ASEAN dalam memerangi terorisme, sambil menegaskan kembali komitmen kerja sama dalam memerangi terorisme.

Namun, tak semua pembicaraan di antara negara-negara ASEAN soal perang melawan terorisme menghasilkan kesepakatan. Dalam pertemuan para Jaksa Agung ASEAN di Kota Kinibalu pada akhir Juni 2003 itu, negara-negara ASEAN gagal menyepakati draf perjanjian antiteror yang diusulkan Malaysia. Sejumlah negara bersikap skeptis terhadap rancangan perjanjian itu, yang tujuannya untuk lebih mempererat kerja sama dalam memerangi terorisme dan berbagai kejahatan lintas batas lain. Singapura, misalnya, melalui delegasinya Jefry Chan mengatakan, sebelum perjanjian itu ditandatangani, semua pemerintah harus memastikan lebih dulu bahwa mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi komitmennya.

"Perjanjian semacam itu bisa sekadar menjadi upaya mahal yang sia-sia bila ada pihak-pihak yang tak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diharapkan pihak-pihak lain."

Dalam ASEAN dikenal pula ASEAN Regional Forum (ARF) yang pada perkembangannya mengembangkan kemampuan untuk memerangi terorisme. ARF merupakan koordinator pemberantasan terorisme ke luar, dengan negara-negara



anggota non-ASEAN. Tetapi di tingkat ASEAN koordinasi berada di sidang menteri-menteri dalam negeri yang bertanggungjawab atas pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Hanya saja dalam perkembangannya keberadaan ARF tidak sepenuhnya dapat secara efektif menyelesaikan berbagai masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam hal pemberantasan terorisme.

Kehadiran ASEAN *Security Community* (ASC) atau Komunitas Keamanan ASEAN (KKA) kemudian menjadi relevan dalam penyelesaian kebuntuan ini. Sebagai sebuah produk dari proses multilateral yang sangat mengutamakan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, ASC mencakup prinsip-prinsip yang memberi petunjuk pemberlakuan konsep-konsep keamanan ASEAN secara menyeluruh, yang pada dasarnya sudah memiliki infrastruktur di dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Mekanisme yang memungkinkan para anggota ASEAN memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan dan kestabilan kawasan yang bersifat transnasional menjadi komitmen penting dalam ASC.

Gagasan ASC sendiri mengisyaratkan tidak akan menjadi sebuah pakta militer, dan rumusan dasarnya adalah untuk mencegah meningkatnya pertikaian regional menjadi konflik bersenjata. Gagasan ASC ini dimaksudkan di mana ASEAN bisa bertransformasi ke dalam sebuah komunitas keamanan tidak hanya pada saat terjadinya perang, tetapi juga pada saat kemungkinan akan terjadinya perang.

Rumusan yang sama sebenarnya juga ada pada ASEAN Regional Forum (ARF), sebuah institusionalisasi yang sangat minimal dan mengambil keputusan sesuai dengan konsensus, sebuah trade-mark politik yang sangat kuat dan efektif di

kawasan ini. Forum ARF sendiri bergerak lambat, condong menjadi sebuah upaya menuju pembentukan saling percaya dan diplomasi preventif. Dan keseluruhan gagasan dalam ASEAN sendiri memang berdiri dan berjalan sesuai gagasan-gagasan ini, saling percaya, preventif, tidak mencampuri urusan dalam negeri, konsensus, dan lainnya.

Menurut Priangina dan Heryaman, ada beberapa alasan penyebab kegagalan ARF dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan di Asia Tenggara, antara lain:

- (1) Meskipun ARF dianggap sebagai instrumen kebijaksanaan keamanan regional, namun tidak ada negara yang bersedia menggantungkan keamanannya pada ARF. ARF bukanlah organisasi fakta pertahanan seperti NATO di Eropa yang dapat menjamin keamanan kolektif anggotanya, tetapi lebih bersifat forum dialog yang sifatnya longgar sehingga kesepakatan-kesepakatanannya tidak terlalu mengikat.
- (2) Proses pembahasan mekanisme ARF mengalami kemandekan karena anggotanya bahkan sampai pertemuan keenam belum menyetujui langkah ARF dari tahap CBM ke tahap diplomasi preventif.
- (3) Anggota ARF belum sepenuhnya meyakini kemampuan ARF. Hal ini disebabkan ketidakmampuan ARF mengatasi berbagai masalah, termasuk dalam masalah konflik laut Cina selatan.

Kegagalan ARF ini diharapkan dapat dieliminir melalui keberadaan ASC ini. Hanya saja ASC hingga saat ini belum dikembangkan secara ekstensif, mengingat isu-isu politik keamanan seringkali bersifat sensitif sehingga pendekatan yang

seringkali diambil bersifat informal, bahkan kadangkala menyimpan isu-isu tersebut di bawah karpet. Ini didasarkan atas kebiasaan di ASEAN yang menganut prinsip non-intervensi. ASEAN misalnya tidak bisa turut campur atas peristiwa politik di Thailand, karena selain prinsip non-intervensi masih dipegang teguh ASEAN, intervensi ASEAN bisa kontraproduktif sehingga merugikan ASEAN.

Pertanyaan yang dapat diajukan ialah apakah terdapat cukup *political will* di kalangan negara anggota ASEAN untuk menindaklanjuti visi ASC ini seperti yang diharapkan oleh pencetus dan *proponent*-nya? Pertanyaan itu didorong oleh kenyataan bahwa dalam menindaklanjuti *ASEAN Vision 2020* ternyata masih terdapat kelesuan dan bahkan keengganan untuk bergerak maju dengan cukup cepat.

Dalam krisis yang melanda kawasan ini sejak pertengahan tahun 1997 dengan dampak besar terhadap perekonomian anggota, negara-negara anggota lebih mengutamakan melihat ke dalam dengan memberi prioritas kepada upaya mengatasi perkembangan dan ketidakpastian politik, ekonomi dan sosial yang timbul didalam negeri. Dilema seperti ini terlihat umpamanya di dalam perkembangan di Kamboja dan Myanmar.

Tantangan lain bagi realisasi ASC dan AEC sesuai jadwal menyangkut kemampuan ASEAN menghilangkan atau sekurang-kurangnya memperkecil jurang perbedaan tingkat perkembangan ekonomi serta beda sistem politik dan sosial yang terdapat di antara negara-negara anggota lama (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dan empat negara anggota baru

(Kamboja/Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang biasa disebut sebagai CLMV). Pada waktu ini ASEAN yang *two-tier* merupakan suatu realitas.

Kenyataan itu tidak dapat dibantah atau dibiarkan, namun belum ada tanda-tanda bahwa jurang pemisah yang ada makin kecil bahkan justru makin besar sedangkan stabilitas kawasan ASEAN sangat bergantung kepada keberhasilan menanggulangi masalah ini secepat mungkin. Perluasan ASEAN dari enam menjadi sepuluh negara (Vietnam bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997 dan Kamboja tahun 1998), di satu pihak telah mempertinggi kedudukan diplomatik ASEAN karena dapat bersuara atas nama seluruh Asia Tenggara. Juga telah memperbesar dengan berarti pasar ASEAN menjadi 500 juta jiwa, jauh lebih besar dari *European Union* (350 juta), Amerika Serikat (270 juta), dan Jepang (126 juta).

Namun, di lain pihak perluasan ini yang membawa serta perbedaan tatar belakang di bidang politik, budaya, agama, sistem, dan tingkat perkembangan ekonomi, serta kepentingan keamanan nasional, telah menimbulkan kesulitan-kesulitan baru bagi ASEAN. Salah satu di antaranya ialah bahwa penerapan pengambilan keputusan dengan cara konsensus menjadi kurang lancar, termasuk dalam hal penanganan terorisme.

Lebih dari itu, penekanan negara yang menitikberatkan pada aspek "keamanan negara" (*state security*) ketimbang "keamanan manusia" (*human security*) oleh ASEAN berpotensi memandulkan fungsi ASC. Dengan kata lain, sebagai organisasi regional ASEAN yang tetap bersandar pada paradigma *state-centric* tidak akan pernah mampu mempertahankan relevansinya. Padahal sebuah komunitas keamanan

ASEAN seharusnya mampu menyeimbangkan antara keamanan negara dan keamanan manusia, serta memberi ruang lebih besar pada interaksi *people-to-people*. Sejumlah pertanyaan tentang eksistensi ASC akan terus digugat bila ASC tidak dapat mengelola peran keamanannya secara baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Bayangkan, akibat polusi asap sejumlah perjalanan terpaksa ditunda, bahkan ada yang dihentikan. Lebih dari 219 orang di Pekanbaru terjangkit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Fenomena masyarakat bepergian, *traveller society*, aktivitas industri pariwisata, pergerakan lintas negara di kawasan, dan sebagainya menjadi terganggu.

Kurang tanggapnya ASC pada masalah polusi asap akan berakibat pada menurunnya tingkat kohesivitas interaksi antaranggota ASEAN. Sebuah pola untuk menciptakan perimbangan baru yang lebih konstruktif bagi ASC seharusnya perlu terus ditingkatkan agar ASC dapat berfungsi sebagai keamanan komprehensif sehingga ASC dapat dipandang sebagai "*a fundamental, unambiguous and long-term convergence of interest among the actors in the avoidance of war*". Kenyataannya, ASC telah berkembang cepat dan ASEAN telah membentuk mekanisme baru yang dibutuhkan negara anggota ASEAN, seharusnya mekanisme pembahasan lebih transparan bagi ASC amat diperlukan agar cita-cita "masyarakat keamanan ASEAN" dapat terwujud.

Meskipun belum berperan secara maksimal dalam pemberantasan terorisme di Asia Tenggara, setidaknya beberapa langkah-langkah penting telah dilakukan oleh ASC sejak pembentukannya, seperti lahirnya berbagai kesepakatan-kesepakatan

keamanan dari ancaman terorisme baik antarnegara ASEAN sendiri maupun antara ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN. Adanya berbagai kesepakatan ini menunjukkan adanya kelancaran komunikasi dan koordinasi antara negara ASEAN dalam upaya pemberantasan terorisme, serta komitmen yang kuat dalam mewujudkannya.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2006 menunjukkan bahwa tingkat serangan teroris di kawasan Asia Tenggara mengalami penurunan yang drastis dibandingkan dengan kawasan lain. Dikatakan dalam laporan itu bahwa meningkatnya kerjasama kontra terorisme di Australia, China, Indonesia, Jepang dan Filipina serta peran aktif ASEAN dalam pemberantasan terorisme ini merupakan kunci berkurangnya aktivitas dan ancaman dari kelompok-kelompok afiliasi Al Qaeda seperti Jemaah Islamiyah dan Abu Sayyaf.

Laporan ini tentunya menjadi kredit point bagi kehadiran ASC dalam struktur ASEAN dan dapat menjadi tumpuan bagi terwujudnya integrasi ASEAN pada 2020 nanti.

#### **B. Langkah-langkah Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan Komunitas Keamanan ASEAN**

Dalam perkembangannya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC telah melakukan berbagai langkah-langkah penting sejak pengusulannya pada tahun 2003 lalu.

Pada bulan Desember 2003 dalam pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) ASEAN-Jepang di Tokyo, 11-12 Desember, sebagai bagian dari eksistensi ASC, ASEAN dan Jepang menyepakati untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme dengan memulai berbagai kegiatan bersama. ASEAN dan Jepang berikrar akan mendukung kegiatan-kegiatan Pusat Kontra Terorisme Regional Asia Tenggara yang bermarkas di Kuala Lumpur. Rencana Aksi (Action Plan) yang ditandatangani Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dan kesepuluh pemimpin ASEAN, mencakup kesepakatan menggelar pertemuan khusus untuk membicarakan soal perang melawan terorisme dalam pertemuan ASEAN-Jepang berikutnya. Mereka pun sepakat menyelenggarakan pelatihan bagi para pejabat penegak hukum ASEAN sebagai bagian dari program peningkatan kemampuan melawan terorisme.

Pembicaraan dan kesepakatan soal pemberantasan terorisme yang melibatkan negara-negara ASEAN ini hanyalah salah satu dan yang terakhir yang dilakukan dalam tahun tersebut, baik pertemuan internal antara negara-negara ASEAN maupun pertemuan eksternal antara ASEAN dan negara-negara lain, termasuk Jepang, yang pertemuan eksternal antara ASEAN dan negara-negara lain, termasuk Jepang, yang menjadi mitra dialognya. Diskusi tentang isu ini terjadi sejak dalam konferensi-konferensi tingkat paling rendah, seperti konferensi panitia perumus, tingkat pejabat tinggi, hingga dalam KTT yang melibatkan para pemimpin puncak negara.

Kemudian pada bulan Juni 2004 para Menteri Luar Negeri Asia Tenggara dalam kerangka ASC bertekad untuk memperkuat kerjasama mereka dalam memerangi terorisme. Ke-10 menteri perhimpunan bangsa Asia Tenggara, ASEAN,

mengeluarkan pernyataan bersama setelah pertemuan sepanjang hari di Jakarta, Indonesia. Mereka menekankan perlunya menanggulangi akar penyebab terorisme, dan mereka menolak setiap usaha untuk menghubungkan terorisme dengan agama, kebangsaan, atau kelompok etnik tertentu.

Pada September 2004, sepuluh kepala staf tentara angkatan darat dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat untuk menangani ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara secara bersama-sama dalam sebuah koordinasi. Menurut Panglima TNI Endriartono yang mewakili Indonesia, pertemuan tersebut bertujuan agar tentara angkatan darat masing-masing negara bisa saling berhubungan dan bekerja sama dengan baik. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menaikkan kemampuan dan saling tukar-menukar kemampuan, khususnya dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Terkait dengan terorisme, berkaca pada pengalaman pahit aksi terorisme yang baru saja menimpa Rusia, Endriartono menyebutkan jaringan terorisme sangat luas dan pasti bersifat lintas negara.

Kita tidak mau seperti aksi terorisme di Rusia yang menelan banyak korban. Untuk itu, perlu kerja sama di antara negara ASEAN. Terorisme memiliki jaringan luas lintas negara. Misalnya, sebuah aksi terorisme di Indonesia bisa jadi dirancang di negara lain agar tidak dicurigai. Ini mendorong perlunya kerja sama<sup>34</sup>

Untuk Indonesia sendiri, sebagai hasil dari pertemuan itu segera mewujudkannya melalui berbagai langkah-langkah penting, antara lain melalui pembentukan 10 Batalyon Raider.

<sup>34</sup> Panglima TNI Ajak Kerjasama Negara ASEAN Hadapi Terorisme, newsVoA.com, 7 September 2004.



Pada bulan Maret 2005 pada Pertemuan ke-15 Tingkat Menteri ASEAN dan European Union (EU), atau "ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM)", membahas berbagai topik, antara lain upaya pemberantasan terorisme serta relevansi ASC di dalamnya. Forum membicarakan kerja sama ASEAN-Uni Eropa (UE) dalam menanggulangi ancaman bahaya terorisme. Selama ini kedua pihak sudah melakukan kerja sama, antara lain di bidang *sharing* informasi dan pelatihan. Termasuk melalui pusat pelatihan anti-terorisme di Indonesia yang disebut juga dengan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation.

Pada 13 November 2006 ASC kembali membahas konvensi anti-terorisme di Kuta, Bali pada 13-15 November. Pertemuan tingkat Kelompok Kerja Ahli (*Expert Working Group*) sebelumnya dilakukan di Manila, Filipina pada 10-12 Oktober 2006. Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, Imron Cotan, di bertujuan mengkaji draft *ASEAN Conventing on Combating Terrorism*, atau Kovensi Pemberantasan Terorisme ASEAN. Upaya yang telah dilakukan antara lain dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi, kerjasama tehnik serta penyusunan instrumen hukum kerjasama pemberantasan terorisme.

Pada 14 Januari 2007 Dalam KTT ASEAN di Filipina, negara-negara Asia harus sepakat untuk lebih baik memerangi terorisme dan kemiskinan. Berdasar kesepakatan antiterorisme yang ditandatangani dalam KTT ini, ASEAN melalui ASC akan melakukan upaya-upaya terkoordinasi untuk menumpas peredaran senjata ilegal dan pergerakan militan di kawasan itu.

Negara-negara anggota ASEAN akan memperketat pengawasan di daerah perbatasan dan saling tukar informasi untuk mencegah aksi terorisme. Dalam deklarasinya, negara-negara ASEAN juga diimbau untuk mengatasi akar penyebab terorisme, antara lain masalah tingkat upah dan perlakuan terhadap buruh migran.

### **C. Peluang Kerjasama Keamanan ASEAN dalam Menghadapi Masalah Terorisme**

Meski belum banyak memberikan hasil sejak pembentukannya 2003 lalu, ASC ke depan masih sangat diharapkan dalam menciptakan integritas ASEAN, khususnya di bidang keamanan. Bagi ASEAN, penanganan atas situasi dan kompleksitas keamanan global dan regional pasca 11 September merupakan tantangan yang mensyaratkan inovasi dan kreativitas baru. Tantangan demikian sudah terasa sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Banyak kalangan, baik di lingkungan ASEAN sendiri maupun di dunia internasional, menilai bahwa organisasi ini hampir lumpuh dan dibuat tidak berdaya oleh berbagai kesulitan yang merupakan akibat dari sejumlah perkembangan. Pertama, ASEAN dinilai terlalu cepat dalam melakukan perluasan keanggotaan yang kini telah mencakup seluruh negara Asia Tenggara. Kedua, kesulitan yang dihadapi ASEAN sekarang ini juga disebabkan oleh terjadinya sejumlah perubahan fundamental di bidang politik dan ekonomi di beberapa negara kunci, seperti Indonesia Thailand, dan Filipina. Terakhir, ada juga yang menilai bahwa kelemahan ASEAN sekarang ini disebabkan oleh runtuhnya kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN. Pendeknya, ASEAN dianggap telah

kehilangan sentralitas diplomatik (*diplomatic centrality*) yang pernah dinikmatinya selama dekade 1980-an sampai awal 1990-an.

Dengan dimulainya apa yang dapat disebut sebagai "Era Perang Melawan Terorisme" sejak peristiwa 11 September, ASEAN kembali dihadapkan kepada sebuah tantangan berat untuk membuktikan dirinya sebagai sebuah organisasi regional yang keberadaannya tidak hanya dibutuhkan, tetapi juga memiliki relevansi dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan baru. Lingkungan strategis dimana ASEAN berada telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, walaupun tidak dikatakan telah berubah secara fundamental. Oleh karena itu, hakekat dari tantangan-tantangan yang dihadapinya juga telah mengalami perubahan. Untuk dapat menjawab tantangan-tantangan baru itu, ASEAN tampaknya tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan semacam refleksi diri.

Tata dunia baru sekarang ini membutuhkan pemikiran-pemikiran baru, dan karenanya ASEAN harus berani bergerak meninggalkan sikap konservatif yang selama ini melekat cukup erat. Dengan kata lain, ASEAN, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah berani dalam upaya memperbaharui dirinya sendiri dan dalam memperkuat relevansinya sebagai sebuah organisasi regional.

Dalam menjawab tantangan ke depan, ASEAN perlu merumuskan sebuah kondisi akhir yang ingin diwujudkan di masa depan secara lebih konkrit. Dengan kata lain, ASEAN perlu merumuskan sebuah kesepakatan mengenai ke arah mana ia akan berkembang, dan bagaimana cara mencapainya. Untuk itu, ASEAN dapat

Mempertahankan komitmen menjadi sebuah "Security Community" dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Cita-cita "perdamaian dan stabilitas" yang termuat dalam Deklarasi Bangkok memerlukan arti yang fungsional dan operasional. ASEAN tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa adanya *sense of purpose* yang jelas; tanpa adanya tujuan praktis yang perlu dicapai, dan tanpa adanya gambaran mengenai kondisi ideal yang harus diwujudkan dimasa depan. Gagasan mengenai *ASEAN Security Community* dimaksudkan untuk memberi *sense of purpose* yang dibutuhkan, tujuan praktis yang perlu dimiliki, dan kondisi masa depan yang harus diwujudkan oleh semua negara anggota.

*ASEAN Security Community* diharapkan menjadi gagasan yang sejalan dengan usulan Singapura mengenai pentingnya transformasi ASEAN menjadi sebuah Masyarakat Ekonomi (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2020. Dalam jangka panjang, sebuah masyarakat ekonomi yang berkelanjutan (*a sustainable economic community*) hanya dapat dijamin dengan terbentuknya sebuah *security community*.

Sebaliknya, sebuah *security community* tidak akan terjamin kelangsungannya tanpa adanya fundasi kepentingan bersama yang dihasilkan oleh *economic community*. Dengan kata lain, *economic community* dan *security community* akan saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya. Karena itu, gagasan mengenai *ASEAN Community*, dimana adanya keterkaitan kuat antara integrasi ekonomi dan *cooperative security*, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan dimasa mendatang dan memiliki prospek yang menjanjikan dalam rangka integritas kawasan.

Jika dikelola dengan baik dan serius, ASEAN dapat berkembang menjadi sebuah *Security Community* komprehensif yang sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik regional, tidak dalam pengertian *security community* yang *Deutschian*. Kalau konsep *Security Community* yang *Deutschian* didasarkan pada pemahaman mengenai keamanan secara militer, ASEAN berpeluang untuk berkembang menjadi sebuah *security community* yang lebih komprehensif, yang mencakup, dan memberi penekanan kuat pada, aspek-aspek keamanan non-militer. Namun, yang penting untuk ditekankan adalah sebuah *Security Community* bukanlah Pakta Pertahanan (*Defence Pact*) atau aliansi militer.

*ASEAN Security Community* mencoba membangun sebuah lingkungan kerjasama yang dapat mencegah terjadinya konflik sejak awal. Bahkan apabila pertikaian terjadi, *ASEAN Security Community* akan menyediakan sebuah kerangka untuk tidak hanya mengelola tetapi juga menyelesaikan konflik tersebut secara damai. ASEAN berada pada posisi yang tepat untuk mewujudkan visi *security community* di masa mendatang. Asosiasi ini telah memiliki beberapa unsur yang memperlihatkan ciri-ciri sebagai sebuah *Security Community*. Bahkan, ASEAN juga telah memiliki praktek-praktek dan institusi, baik formal dan informal, untuk mencegah dan mengelola konflik diantara negara-negara anggota. Namun, untuk dapat berkembang menjadi *Security Community*, dimasa mendatang ASEAN perlu mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Disamping itu, basis bagi terwujudnya integrasi ekonomi yang kuat, yang diharapkan dapat diwujudkan oleh gagasan *ASEAN Economic Community* dapat memperkuat proses transformasi politik dan

keamanan ASEAN. Dengan kata lain apabila visi ASEAN Economic Community dapat diwujudkan pada 2020, maka gagasan mengenai *ASEAN Security Community* bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan.

Tantangannya, bagaimana wadah ASC mampu mengatasi aneka masalah keamanan yang memiliki implikasi regional dapat diakomodasi secara instrumental. Sebagai sebuah komunitas, ASC harus memiliki kemampuan untuk mencegah, mengelola, dan menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Meski demikian, rencana aksi ASC itu harus diinkorporasikan dalam platform yang jelas dan memuat visi tentang ASC dalam *time-frame* yang disepakati.

Akhirnya, peningkatan kerja sama antaranggota secara reguler perlu ditingkatkan dengan menyusun dokumen berisi norma dan prinsip yang dapat dijadikan pedoman kerja sama politik dan keamanan di kawasan secara terintegrasi. Bagaimanapun, norma dan prinsip ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang dihadapi dan memenuhi kebutuhan strategis ASC masa depan. Diharapkan, ASC bukan saja berfungsi sebagai rezim keamanan yang mampu menjamin kestabilan kawasan, tetapi juga memenuhi kebutuhan keamanan secara luas sehingga mampu merespons tantangan masa depan kawasan secara lebih baik. Selain itu, dengan kian menguatnya gangguan keamanan, seperti terorisme dan sebagainya, kerja sama keamanan di antara anggota ASEAN seharusnya menjadi pijakan saling memperkuat kerja sama ASEAN. Sikap saling curiga di antara anggota ASEAN harus segera ditinggalkan dan kontribusi anggota ASEAN diperlukan guna mendukung ASC

menjadi wahana efektif dan mendapat dukungan politik secara luas di kawasan dalam menghadapi tantangan mendatang.

Memasuki dekade ke-4 saat ini menuju terbentuknya komunitas ASEAN, tantangannya adalah mengisi *soft power* yang dimiliki secara dinamis, bertumpu pada kekuatan pendalaman maupun perluasan aktivitas kerja sama. *Shaping and sharing of norms* kemajuan kesepakatan yang dicapai dari naskah deklarasi, komunique bersama maupun rencana aksi harus bisa diwujudkan lebih membumi agar bisa memberi manfaat luas bagi publik.

Tantangan rumit yang tidak kalah penting adalah dinamika konstituen domestik. Ketika kesepakatan dicapai, komponen masyarakat domestik di tiap negara ASEAN dapat merespons secara berbeda. Ada kalanya upaya maju di tingkat ASEAN, misalnya soal pembangunan politik dalam konteks implementasi ASEAN Security Community Plan of Action (ASC PoA), dimentahkan satu-dua negara hanya karena takut respons negatif domestik. Akhirnya, perwujudan persetujuan terasa lambat. Adalah kebutuhan, kesepakatan ASEAN berupa deklarasi, komunique bersama, dan rencana aksi dapat dimasyarakatkan ke semua tingkatan agar komponen domestik dengan *comfort level* berbeda dapat memahami keputusan secara lebih hidup.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) *ASEAN Security Community (ASC)* atau Komunitas Keamanan ASEAN dalam peranannya untuk pemberantasan terorisme di Asia Tenggara masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti prinsip non-intervensi, serta masih adanya keengganan sejumlah Negara dalam menyepakati aksi bersama (*Plan Action*) dari ASC ini. Meski demikian beberapa langkah penting telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam kerangka ASC, khususnya dalam pemberantasan bahaya terorisme, seperti disepakatinya beberapa kerjasama lintas negara, baik yang dilakukan antara negara ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN. Keberadaan ASC juga telah berperan dalam menekan tingkat serangan terorisme di Asia Tenggara, seperti yang dilaporkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2006.
- 2) Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh ASC sejak pengusulannya pada tahun 2003 silam adalah semakin terjalannya komunikasi dan koordinasi antara negara ASEAN dalam hal pemberantasan terorisme dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya.
- 3) Keberadaan ASC ke depan menunjukkan peluang yang menjanjikan dan diharapkan dapat membantu mempercepat integrasi ASEAN. Meski demikian beberapa hambatan masih akan ditemui, seperti masih dipertahankan prinsip non-



intervensi secara ketat, yang berimbas pada kehatian-hatian ASEAN dalam menyelesaikan berbagai masalah keamanan di kawasan ini. ASC hanya akan dapat berperan secara signifikan jika dapat mengeliminir prinsip non-interevensi ini atau lebih longgar dalam pelaksanaannya.

## B. Saran

- 1) Untuk lebih memantapkan eksistensi ASC negara-negara ASEAN seharusnya secara intensif melakukan dialog guna mengeleminir kesenjangan yang ada dan dalam menghapus rasa saling curiga antara negara ASEAN akan adanya agenda lain dari pembentukan ASC ini, seperti yang terjadi pada awal pengusulannya.
- 2) Dalam hal penanggulangan kejahatan terorisme, koordinasi antara negara ASEAN melalui ASC hendaknya semakin diperluas dan didukung sepenuhnya oleh *political will* oleh masing-masing negara anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bandoro, Bantarto, 1996, (*Peny.*) *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. Penerbit: *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, Jakarta.
- Djelantik, Sukawarsini, 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Parahyangan Centre Study of International Studies.
- Farid, Ahmad, 2002. *Terrorisme In South East Asia: How Real is The Threat*, The Indonesia Quarterly. Vol. 30, First Quarter.
- Habib, Hasnan, 1995. *Kapita Selekta Strategi dan Hubungan Internasional.*, Jakarta: CSIS.
- Hardiman, Budi, 2003. *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, Dalam Marpaung, Rusdi dan Al Araf (ed), *TERRORISME: Defenisi, Aksi, dan Regulasi*, Jakarta: IMPARSIAL.
- Luhulima, C.P.F, 2003. *Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara*, dalam Analisis CSIS edisi Tahun XXXII/2003 Nomor 1.
- Morgenthau, J. Hans, 1991. *Politik Antar Bangsa*, Buku Ke Satu, Revisi Kenneth W. Thompson, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Musa, M., 2003. *Hegemoni Barat Terhadap Percaturan Politik Dunia, Sebuah Potret Hubungan Internasional*, Jakarta: Wahyu Press.
- Nasrun, Mappa, 1990. *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problem and Prospect*: Disertasi, Unhas.
- Paul, Wilkinson, 1977. *Terrorism and the Liberal State*, London: The Mac Millan Pres Ltd.
- Plano Jack C, Olton, 1985. *Kamus Hubungan Internasional* Terj. Wawan Juanda, Bandung: CV. Abadin.
- Priangina, Ade dan Oman Heryaman, 2003. *Kajian Strategis: Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia*. Penerbit: *Centre for Political and Local Autonomy Studies FISIP Universitas Pasundan*, Bandung.

- Rudi, T.M. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung. PT. Refika Aditama.
- Rudy, T.M., 2002. *Studi Strategis, dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Rustan, Mario, 1981. *The Hijacking of Flight GA 206*, The Special Operations Paper.
- Sabir, 1992. *ASEAN: Harapan dan Kenyataan*. Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saputra, S.P., 1985. *Politik Luar Negeri RI*, Bandung: CV. Remaja Karya.
- Suherman, A.M., 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukma, Rizal, 2003. *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni Amerika Serikat dan Implikasi Regional*. Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, bertemakan "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.
- William, Gutteridge, 1986. *Contemporary Terrorism*, New York: Fact an File Publications.
- Wolfe, H. James, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power*. Bandung, CV. Abardin.

#### **Majalah dan Surat Kabar :**

- Kompas, *Malaysia Melancarkan Perang Terhadap Terorisme*, 20 Agustus 2002
- Kompas, *Pemerintah Niat Menggelar Konser Akbar di Bali*, 20 Oktober 2002.
- Kompas, *CIA Tangkap Warga Indonesia*, 15 Agustus 2003.
- Media Indonesia, *Jakarta Minta Ekstradisi Teroris*, 28 Agustus 2002.
- The Strait Times, *Protest of the Prime Minister*, 22 Agustus 2002.
- MewsVoA.com, *Panglima TNI Ajak Kerjasama ASEAN Hadapi Terorisme*, 7 September 2004

*Internet:*

- [http://www.dephan.go.id/buku\\_putih/bab\\_v.htm](http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm), *Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Strategis Pertahanan*, 14 Juli 2005.
- <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4416>, *Menlu: Komunitas Keamanan ASEAN Tak Jadi Fakta Militer*, 7 Februari 2005.
- <http://www.kompas.com>, *Vincensio Dugis, Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN*.
- [http://www.mipt\\_terrorisme.co.id](http://www.mipt_terrorisme.co.id), diakses pada 02 Mei 2007.